

**ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN DANA DESA**  
**(Studi Kasus Desa Paranggi Kecamatan Ampibabo Tahun 2019-2021)**



**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana (S1)  
Pada Jurusan Ekonomi Syariah (ESY) Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI)  
Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu*

**Oleh**

**ABD. RAHMAT**  
**NIM :19.5.12.0150**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU**  
**2024**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat orang lain maka skripsi dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.

Palu, 29 Mei 2024



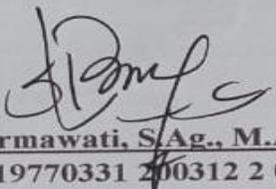
**Abd. Rahmat**  
**Nim.19.5.12.0150**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul ‘**Analisis Kinerja Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Paranggi Kecamatan Ampibabo Tahun 2019-2021)**’. Oleh Mahasiswa atas Nama Abd. Rahmat, NIM : 19.5.12.0150 Mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi proposal yang bersangkutan, maka masing–masing pembimbing memandang bahwa proposal tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk diujikan.

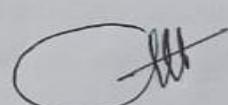
Palu, 29 Mei 2023  
9 Dzulqai’dah 1444

**Pembimbing I,**



**Dr. Ermawati, S.Ag., M.Ag**  
**NIP. 19770331 200312 2 002**

**Pembimbing II,**



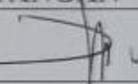
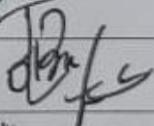
**Nurfitriani, S.El., M.E**  
**NIP. 199312072019032012**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara Abd. Rahmat, NIM : 19.5.12.0150 dengan judul ‘Analisis Kinerja Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Paranggi Kecamatan Ampibabo Tahun 2019-2021) yang telah diujikan di hadapan dewan penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu pada tanggal Kamis, 04 Juli 2024 M. yang bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1445 H. dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Jurusan Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.

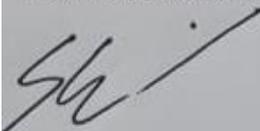
Palu, Agustus 2024  
27 Dzulhijjah 1445

### DEWAN PENGUJI

JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
Ketua	Nursyamsu, S.H.I., M.H.I	
Munaqisy I	Noval, M.M	
Munaqisy II	Rachmawati A Rifai, M.M	
Pembimbing I	Dr. Ermawati, S.Ag., M.Ag	
Pembimbing II	Nurfitriani, S.El., M.E	

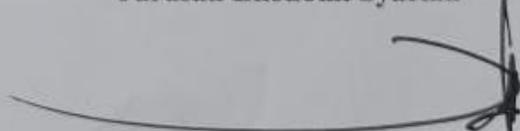
Mengetahui:

Dekan  
Fakultas Ekonomidan Bisnis Islam



Dr. Sagir Muhammad Amin, M.Pd.I.  
NIP 196506121992031004

Ketua  
Jurusan Ekonomi Syariah



NURSYAMSU, S.H.I., M.SI  
NIP 198605072015031002

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. Karena berkat rahmat dan hidayah-Nyalah, proposal ini dapat diselesaikan sesuai target waktu yang telah direncanakan. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, beserta segenap keluarga dan sahabatnya yang telah mewariskan berbagai macam hukum sebagai pedoman umatnya.

Penulis menyadari tidak mungkin terwujud tanpa dorongan, bantuan, dukungan, dari berbagai pihak. Penulis berkeyakinan “bahwa tidak ada yang dapat menolong tanpa izin dan kehendak Allah Swt”, sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan proposal ini guna untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Datokarama Palu.

Penulis mohon maaf atas segala kekurangan yang ada, dan apabila terdapat kesalahan dalam penulisan ini, untuk itu penulis mengharapkan koreksi, saran dan kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak. Semoga proposal ini dapat memberi manfaat bagi kita dan dapat berguna bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan, khususnya dibidang Ekonomi Syariah.

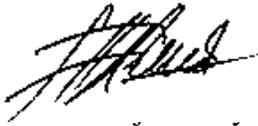
Melalui kesempatan ini pula penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan bantuan yang sangat berarti dalam penulisan skripsi khususnya kepada:

1. Patutnya penulis mengucapkan rasa terima kasih yang ikhlas secara khusus dan penuh hormat kepada orang tua penulis yaitu Ayah Darwin dan Ibu Sarina yang

tersayang, begitu banyak pengorbanan, mendoakan, memberikan motivasi, semangat dan mendidik penulis dari jenjang pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Juga, seluruh saudara penulis yang senantiasa selalu memberikan semangat kepada penulis.

2. Bapak Prof. Dr. H. Lukman S Thahir, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu Dr. Hamka. S.Ag., M.Ag selaku wakil rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Hamlan. M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Faial Attamimi, S.Ag., M.Fil.I selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, yang telah memberikan kemudahan dalam menimbah ilmu pengetahuan di kampus hijau Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.
3. Bapak Dr. Sagir Muhammad Amin, M.Pd.I, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Bapak Dr. Syaakir Sofyan, S.E, M.E selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, dan Kelembagaan, Ibu Dr. Sitti Aisyah, S.E.I., M.E. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Malkan, M.Ag., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerja Sama.
4. Nursyamsu, S.H.I., M.S.I. Selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Dan Dewi Salmita, S.Ak., M.Ak Selaku Sekertaris Jurusan Ekonomi Syariah dan Pembimbing Akademik yang telah mengarahkan penulis selama dalam proses perkuliahan.
5. Ibu Dr. Ermawati. S.Ag., M.Ag selaku Pembimbing I dan Ibu Nurfitriani, S.El., M.E selaku Pembimbing II yang dengan ikhlas telah membimbing penulis dalam menulis skripsi ini hingga selesai sesuai harapan.

6. Fadhliah Mubakkira, S.H.I., M.H.I selaku Panasehat Akademik yang sangat sabar membimbing Penulis dalam bidang akademik.
7. Kepala Perpustakaan Bapak Rifai, S.E., MM dan seluruh staf perpustakaan UIN Datokarama Palu.
8. Seluruh bapak dan ibu Dosen dalam lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Datokarama Palu khususnya Bapak dan Ibu dosen yang dengan setia, tulus dan ikhlas memberikan ilmu pengetahuan serta nasehat kepada Penulis selama kuliah. Seluruh *staf* Panasehat Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada Penulis selama kuliah.
9. Kepada kaka penulis Oktafiana A.md.,Gizi yang telah mendukung dan membantu kuliahku sampai saat ini.
10. Teman-teman seperjuangan Ekonomi Syariah 5 yang selalu memberikan semangat kepada penulis hingga selesainya penelitian.
11. Seluruh responden yaitu kantor desa dan masyarakat di Desa Paranggi yang telah bersedia membantu dan meluangkan waktu dalam memberikan informassi dan data untuk kepentingan penelitian ini.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan, namun sama sekali tidak mengurangi rasa hormat dan terima kasih, atas kebaikan dan keikhlasan kalian.
13. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada diri saya sendiri, yang selalu bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini, selalu terlihat baik-baik saja meskipun saya lelah, saya tahu kita tidak akan sampai pada tahap ini tanpa



g baik. Tanpa diri kita sendiri apapun itu tidak akan berlalu dengan mudah. Terima kasih banyak dan lebih banyak lagi.

Semoga seluruh dukungan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal Shaleh, mendapatkan balasan kebaikan dan pahala dari Allah Swt. Penulis mohon maaf atas segala kekurangan yang ada, dan apabila terdapat kesalahan dalam penulisan ini, untuk itu penulis mengharapkan koreksi, saran dan kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi kita dan dapat berguna bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan, khususnya dibidang Ekonomi Syariah.

Palu, 29 Mei 2023  
9 Dzulqai'dah 1444

**Penyusun**



**ABD. RAHMAT**

**Nim : 19.5.12.0150**

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xi
<b>ABSTRAK</b> .....	xii
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II</b> .....	8
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	8
A. Penelitian Terdahulu .....	8
B. Kinerja.....	11
1. Pengertian Kinerja.....	11
2. Indikator Kinerja .....	14
3. Tujuan kinerja.....	14
C. Pengelolaan dana desa.....	15
1. Pengertian pengelolaan.....	15
6. Implementasi Manajemen .....	19
D. Desa.....	25
1. Pengertian Desa .....	25
2. Prioritas Pembangunan Desa .....	27
E. Dana Desa .....	31
1. Pengertian Dana Desa .....	31
6. Ruang Lingkup Dana Desa.....	34
7. Penggunaan dana desa.....	36
F. Kerangka Pikir .....	38
<b>BAB III</b> .....	40
<b>METODE PENELITIAN</b> .....	40
A. Pendekatan dan Desain Penelitian .....	40
B. Lokasi Penelitian.....	41

C. Kehadiran Peneliti.....	41
D. Data dan Sumber Data .....	41
E. Teknik Pengumpulan Data.....	43
F. Teknik Analisis Data.....	44
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	46
<b>BAB IV .....</b>	<b>49</b>
<b>HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>49</b>
A. Gambaran Umum Kondisi Desa Paranggi .....	49
1. Sejarah Desa Paranggi.....	49
2. Kondisi Geografis Desa Paranggi .....	55
1. Kondisi Demografis Desa Paranggi .....	55
2. Sarana dan prasarana desa .....	57
3. Kondisi Sosial Budaya Dan Ekonomi Desa Paranggi .....	58
4. Kondisi Pemerintahan dan kelembagaan masyarakat .....	59
B. Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Paranggi Tahun Anggaran 2019-2021 .....	61
C. Pengelolaan Dana Desa Di Desa Paranggi Tahun 2019-2021 .....	62
D. Kinerja Karyawan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Paranggi ...	68
<b>BAB V.....</b>	<b>73</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan .....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>xii</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	10
Tabel 4.1 Kepala Desa Yang Pernah Menjabat Di Desa Paranggi .....	51
Tabel 4.2 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Paranggi .....	56
Tabel 4.3 Mata Pencaharian Masyarakat Desa Paranggi .....	57
Tabel 4.4 Sarana Dan Prasarana Desa Paranggi .....	57

## ABSTRAK

**Nama Penulis : ABD. Rahmat**  
**NIM : 19.5.12.0150**  
**Judul Skripsi : Analisis Kinerja Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Paranggi Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong).**

---

---

Dalam Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, menerangkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, untuk dapat mencapai amanat Undang-Undang penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut, maka pemerintah membutuhkan dukungan dari aparatur pemerintah yang tangguh. Dengan demikian pemerintah daerah sebagai pelaksana amanat untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa harus memiliki kemampuan mengelola sumber daya manusia yang tersedia di daerahnya masing-masing. Dana Desa ialah sejumlah anggaran dana yang dialokasikan pada desa dari pemerintah, berasal dari anggaran pendapatan serta belanja negara yang ialah sumber dari dana perimbangan keuangan pusat serta daerah.

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui kinerja pengelolaan dana desa di desa paranggi kecamatan ampibabo kabupaten parigi mouton.

Penelitian ini merupakan Jenis penelitian yang digunakan deskriptif dan eskalasi dengan menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, verifikasi dan pengambilan kesimpulan.

Menunjukkan bahwa Pengelolaan Dana Desa Paranggi Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong cukup baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pemeliharaan karena pengelolaan dana desa Paranggi Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong patuh terhadap peraturan atau kebijakan peraturan daerah dan arahan kepala desa serta terbuka untuk mendengarkan aspirasi masyarakat dengan baik dan sesuai prosedur yang ada. Sedangkan dari segi Kinerja Aparatur Desa Paranggi Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong dalam pengelolaan dana desa sudah cukup baik dari segi kuantitas kerja, kualitas pekerjaan, pelaksanaan tugas, dan tanggung jawab, karena aparatur Desa Paranggi Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong patuh terhadap peraturan atau kebijakan peraturan daerah dan arahan kepala desa serta terbuka untuk mendengarkan aspirasi masyarakat dengan baik dan sesuai prosedur yang ada.

Saran kepada Kepala Desa Paranggi Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong agar lebih meningkatkan sumber daya manusia aparatur Desa Paranggi Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong. Kepada masyarakat agar lebih bijak dalam setiap melakukan komplek terhadap kinerja dari aparatur desa Paranggi Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong Paranggi Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong harus sesuai dengan prosedur yang ada.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, menerangkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, untuk dapat mencapai amanat Undang-Undang penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut, maka pemerintah membutuhkan dukungan dari aparatur pemerintah yang tangguh. Dengan demikian pemerintah daerah sebagai pelaksana amanat untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa harus memiliki kemampuan mengelola sumber daya manusia yang tersedia di daerahnya masing-masing.<sup>1</sup>

Dana Desa ialah sejumlah anggaran dana yang dialokasikan pada desa dari pemerintah, berasal dari anggaran pendapatan serta belanja negara yang ialah sumber dari dana perimbangan keuangan pusat serta daerah. Dana ini diberikan serta dibelanjakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat. Dana desa juga disalurkan pemerintah pusat melalui daerah kabupaten, sumber pendapatan salah satunya dari bantuan. Dimana bantuan tersebut menjadi salah

---

<sup>1</sup> Fitri Kinerja Pemerintah Desa dalam Pengelolaan dana Desa pada desa vatunonju Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi ,” *KATALOGIS* 3, No. 11, November (2015):180-192.[Jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/katalogis/article/view/6472](http://Jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/katalogis/article/view/6472)

satu sumber pendapatan desa yang dianggarkan setiap tahun. Pemberian dana desa yang bersumber APBN ialah wujud pengakuan Negara terhadap kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur serta mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan gagasan, hak asal usul dan hak tradisional.<sup>2</sup> Disamping itu, pemberian dana Desa juga dimaksudkan untuk mendukung meningkatkannya kesejahteraan masyarakat serta pemerataan pembangunan, serta komitmen pemerintah untuk secara serius memperkuat pelaksanaan otonomi daerah serta desentralisasi fiskal, sekaligus wujud dari implementasi nawacita, khususnya cita ketiga, yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat pembangunan daerah serta Desa dalam kerangka NKRI. Sebagaimana diamanahkan dalam UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya ditulis UU DESA), yang ditindak lanjuti dengan terbitnya PP Nomor 43 tentang peraturan pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, dinyatakan bahwa tugas penataan Desa serta pemantauan serta pengawasan pembangunan Desa serta pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam konteks keuangan Desa, instansi pemerintahan provinsi serta pemerintah memiliki tugas serta fungsinya masing-masing sesuai dengan tingkatannya. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur serta mengurus pemerintahnya sendiri sesuai perundangan.

---

<sup>2</sup>Dadang Kurnia, 'Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Serta Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa', Baserta Pengawasan Keuangan Serta Pembangunan (BPKP). Jakarta. 2015.13

Dana desa yang sangat fantastis telah dipercayakan oleh pemerintah dikelola agar sumber daya masyarakat atau pun desa itu sendiri menunjukkan kemajuan atau pengembangan di setiap fasenya. Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat merupakan hal yang sangat lumrah diperbincangkan untuk kemajuan dan perubahan negara saat ini di masa yang akan datang, terutama dari perspektif keterampilan masyarakat Indonesia, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Dan pembangunan berbasis pada masyarakat (*community based development*) yang bertumpu pada *community development*.<sup>3</sup>

Pengelolaan keuangan desa sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu desa karena mampu berkembang atau tidaknya, tergantung pada cara pengelolaan keuangannya. Pengelolaan keuangan desa yang baik akan menunjukkan kinerja pemerintah desa yang baik pula. Akan tetapi pada berbagai kasus sering timbul ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja keuangan yang ada. Dimana jumlah anggaran yang besar berbanding terbalik dengan jumlah anggaran yang terealisasikan.<sup>4</sup>

Kamus besar Indonesia, menerjemahkan anggaran sebagai perkiraan, perhitungan, atau aturan atau taksiran mengenai penerimaan dan pengeluaran khas yang diharapkan untuk periode yang akan datang, atau rencana penjabatan sumber daya yang dinyatakan dengan angka, biasanya dalam satuan uang.

---

<sup>3</sup>Aris Triyono, 'Pengaruh Lokasi Dana Desa Serta Program Pembangunan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Bukit Lipai Kecamatan Batang Cenaku', *Jurnal Manajemen Serta Bisnis*, 2018.

<sup>4</sup>Yayu Sri Eva 'Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas Dan Rasio Pertumbuhan Pada Kantor Desa Jampu Kabupaten Soppeng'. *Jurnal manaemen dan bisnis 2019*.

Sedangkan dalam teori mengenai pengelolaan anggaran desa, secara rinci menyebutkan akan manfaat penyusunan kinerja pengelolaan anggaran desa,<sup>5</sup> yakni memberikan kewenanga pada pemerintahan desa dalam menyelenggarakan administrasi desa, yang menurut Sondang P.Siagian,<sup>6</sup> administrasi adalah keseluruhan proses kerja sama antaradua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Mengenai kinerja pengelolaan keuangan desa, menyebutkan pendapatan menekankan bahwa penerimaan (pendapatan dari susunan belanja lebih menentukan dan berpengaruh lebih besar, termasuk dalam susunan anggaran pendapatan dan belanja desa. Artinya haruslah sangat diperhitungkan dari mana saja pemerintaah desa memperoleh penerimaannya (pendapatannya).<sup>7</sup> Pendapatan menyatakan bahwa, aspek penerimaan (pendapatan) dari anggaran belanja sama penting dengan aspek pengeluarannya (belanjanya). Bahkan bagi negara-negara baru berkembang yang merintis ke arah pembangunan ekonomi, aspek ini mempunyai pengeruh yang lebih besar. Hal ini disebabkan karna aspek pemerintah menentukan sekali pengeluaran yang dapat dilakukan oleh negara.<sup>8</sup> Penulis sendiri berkeyakinan bahwa dalam anggaran pendapatan dan belanja desa, pendapatan wajib ada, agar dapat melakukan pengeluaran atau

---

<sup>5</sup> Icuik Rangga Bawono dan Erwin Setyadi, *Panduan Penggunaan Dan Pengelolaan Dana Desa*, (Grasindo: Jakarta,2019). 46

<sup>6</sup> Ali Mufiz, *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*, (Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka,2011).1.5

<sup>7</sup> Salman Husin Tanjung,*Sistem Pemerintahan Desa Edisi Kedua*, Sumedang:( Alqa Print Jatinangor. 2005).58

<sup>8</sup> *Ibid.* 5

belanja. Karna bagaimana mungkin pemerintah desa dapat belanja apabila ternyata tidak memiliki pendapatan (uang). Semua itu harus dirancang secara sungguh-sungguh dengan benar dan tepat sasaran sesuai dengan kondisi dan kemampuan masing-masing desa agar hasilnya dapat optimal.<sup>9</sup>

Profesional diatas dinyatakan bahwa aparat pemerintahan desa harus mencerminkan sikap dan tindakan aparat pemerintahan dalam menjalankan tugas dan fungsi nya supaya berjalan efektif dan harus mencerminkan aspek tingkah laku untuk aparat pemerintahan desa dalam melayani masyarakat. Oleh karenanya aparat pemerintahan desa di tuntutan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional.

Indikator bahwa tidak profesional dari aparat pemerintahan desa bisa di lihat dari kemampuan, keterampilan,keahlian dan pengabdian. Bahwa di lihat dari segi kemampuan, keterampilan, dan keahlian adalah kapasitas seseorang untuk melakukan beragam tugas dalam suatu pekerjaan. Sedangkan pengabdian bisa di lihat dari sikap dan tindakan dari aparatur dalam menjalankan tugas pemerintahan desa. Konsep ini, berlaku untuk setiap desa yang ada di indonesia termasuk, Desa Paranggi Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Mutong.

Di kecamatan Ampibabo terdiri dari 19 Desa yaitu salah satunya Desa Paranggi, yang memiliki jumlah penduduk 1842 Jiwa terdiri dari laki-laki 929 jiwa dan perempuan 913 jiwa dengan jumlah 555 KK. Di Desa Paranggi terdiri dari 4 Dusun yaitu Dusun I, Dusun II, Dusun III, dan Dusun IV. Di kecamatan

---

<sup>9</sup> Muhamad Mu'iz Raharjo. *Pengelolaan Dana Desa*, ( Jakarta: Diterbitkan PT Bumi Aksara. 2021). 3.

Ampibabo ini mengalokasikan Dana kesetiap Desanya pada Tahun 2019 berkisar antara Rp.1.000.000.000.00 (Satu Milyar) pertahun sudah termasuk anggaran aparatur Desa. Anggaran Dana Desa tiap tahunnya akan bertambah jumlahnya atau bisa juga berkurang jumlahnya tergantung dari sistem perkembangan Desa.

Jika dilihat dari infrastruktur Desa di Desa Paranggi sesuai dengan kebutuhan Desa melalui optimalisasi penggunaan Dana Desa di peruntukan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Peran pemerintah dan dukungan masyarakat secara partisipatif menjadikan pembangunan jadi tepat sasaran. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembangunan di Desa Paranggi cukup baik, pemerintah Desa sangat memperhatikan perkembangan pembangunan Desa sehingga Desa Paranggi ini cukup berkembang dan bisa setara dengan desa lain. Akan tetapi, yang menjadi sisih permasalahannya adalah kurangnya sumber daya manusia yaitu minimnya pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan alokasi dana Desa sehingga timbul kecurigaan tentang penyelewangan dana Desa.

Menurut uraian dari Kaur Umum yaitu ibu Muliati, mengatakan bahwa selama Bapak Asdin Haya menjabat sebagai kepala Desa ada beberapa infrastruktur yang telah di bangun seperti drenase, Rabat betton, dan Bedah rumah.

Maka dari itu ketika melihat dari Desa lain yang di buat spanduk atau baliho besar untuk bukti bahwa pengalokasian Dana Desa sudah sesuai dengan prosedur yang ada, Namun di Desa Paranggi saya tidak melihat dibuatkan spanduk seperti yang ada di Desa lain. Hal tersebut yang membuat banyak sekali masyarakat yang bertanya-tanya terkait pengalokasian dana Desa. Salah

satu alasan harus adanya keterbukaan karena agar memudahkan masyarakat untuk melihat serta mengetahuinya sehingga tidak akan muncul kecurigaan tentang penyelewengan dana Desa.

Menurut uraian dari Kaur Keuangan yaitu Ibu Rosnawati, mengatakan bahwa sudah menjadi kewajiban untuk menginformasikan kepada masyarakat dengan memasang baliho APBDES di tempatkan dikantor Desa atau di tempat umum. Namun di Desa Paranggi kadang menginformasikan kadang tidak sempat di pasang namun beberapa tahun ini belum ada di buatkan spanduk.

Ada sebagian Masyarakat masih sering mengeluhkan para Aparatur Desa yang seringkali tidak ditemui saat jam kerja sehingga jika ada keperluan harus menunggu.

Menurut uraian dari kaur keuangan yaitu Ibu Rosnawati jika dipresentasikan menurut saya kinerja aparatur Desa sekitar 50 persen mungkin tidak sesuai dengan harapan masyarakat karena jika ditingkatkan kesejahteraan Aparatur Desa mungkin akan lebih loyal dalam melaksanakan tugas. Namun jika seperti ini jadi persoalan juga apalagi sudah berkeluarga karena harus memenuhi kebutuhan kalau hanya mengharapkan insentif dari dana Desa ini diterima setiap 3 bulan sekali maka itulah yang menyebabkan terkadang Aparatur Desa jarang hadir dikantor Desa karena harus mencari kerja sampingan makanya jika dilihat dari luar kurang efektif.

Tugas Aparatur Desa Paranggi Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong dalam pengelolaan Dana Desa merupakan tugas yang sangat berat. Suksesnya pengelolaan Dana Desa bergantung pada kinerja aparatur Desa yang terampil dan bertanggung jawab atas tugas yang telah di berikan. Maka dari itu sumber daya manusia menjadi faktor paling penting untuk mengukur serta meningkatkan kualitas kinerja suatu instansi. Hal ini yang membuat penulis tertarik untuk mengambil judul tentang **“Analisis Kinerja Pengelolaan Dana Desa Studi Kasus (Desa Paranggi Kecamatan Ampibabo Tahun 2019-2021)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengelolaan dana desa paranggi kecamatan ampibabo tahun 2019-2021?
2. Bagaimana kinerja pengelolaan dana desa paranggi kecamatan ampibabo tahun 2019-2021?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengelolaan dana desa paranggi kecamatan ampibabo tahun 2019-2021?
2. Untuk mengetahui kinerja pengelolaan dana desa paranggi kecamatan ampibabo tahun 2019-2021?

## **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut maka manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelas SE pada jurusan ekonomi syariah dan agar mendapatkan pemahaman lebih dalam pengembangan kinerja pengelolaan anggaran desa paranggi kecamatan ampibabo tahun 2019-2021.

2. Bagi Desa

Diharapkan hasil penelitian ini bisa dijadikan pedoman agar bisa meningkatkan kinerja keuangannya dengan baik pada masa yang akan datang.

### 3. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan referensi tambahan kepastakaan dan dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian serupa.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Sebagai bahan pertimbangan dan acuan dalam penelitian akan di cantumkan beberapa hasil penelitian oleh beberapa peneliti di antaranya :

1. Penelitian yang dilakukan oleh I Arianto dengan judul “ Analisis Kinerja Aparatur Desa Dalam pengelolaan Dana Desa Taunca” pada tahun 2018. Hasil penelitian ini diperoleh bahwa kinerja aparatur desa dalam pengolaan dana desa sangat efektif, hal tersebut dibuktikan dengan presentase jawaban responden yang tergolong sangat efektif, dilihat dari nilai rekapitulasi tanggapan responden didapat nilai total 334 yang berada pada interval 315-375 yang merupakan kategori sangat efektif.<sup>10</sup>
2. Penelitian yang dilakukan oleh serlia R Lamandasa, Seprianus ntada dengan judul “ Analisis kinerja Aparatur Pemerintah Desa Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bulili Kecamatan lore selatan” pada tahun 2022. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tahap pengelolaan ADD sudah berjalan sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014.untuk penggunaan dan pengawasan ADD telah memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparasi.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>I Arianto, Analisis Kinerja Aparatur Desa Dalam pengelolaan Dana Desa Taunca, Skripsi Universitas sintuvu maroso, (2018)

<sup>11</sup>Serlia R Lamandasa, Seprianus ntada dengan judul “ Analisis kinerja Aparatur Pemerintah Desa Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bulili Kecamatan lore selatan”, *jurnal ekomen*, vol 20, N. 2, (2020)

3. Penelitian ini yang dilakukan oleh Reski Wahdani dengan judul “ Analisis kinerja aparatur desa Jonjo Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa”. Tahun 2021. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa indikator produktivitas terlihat bahwa produktivitasnya cukup baik. Oleh karena itu, kinerja aparatur desa masih harus melakukan perbaikan demi terciptanya kinerja yang efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat desa tersebut.<sup>12</sup>
4. Penelitian ini dilakukan oleh Husnul Hatimah dengan judul “Analisis Kinerja Perangkat Desa Terhadap Penggunaan Dana Desa Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Watatu Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala)”. Dalam penelitian ini kinerja perangkat Desa dalam pengelolaan dana Desa Watatu Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Donggala yang dilakukan terhadap upaya peningkatan pelayanan publik pemerintah desa Watatu sangat memuaskan. Hal ini karena adanya rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) serta didukung pula oleh laporan penyelenggara pemerintah desa (LPPD).<sup>13</sup>
5. Penelitian ini dilakukan oleh Sumiati dengan judul “ Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi”. Dalam penelitian ini penerapan fungsi-fungsi manajemen terhadap pengelolaan alokasi dana Desa pada Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi tidak optimal. Hal ini terlihat dalam administrasi

---

<sup>12</sup>Reski Wahdani, Analisis kinerja aparatur desa Jonjo Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa, Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar, (2021).

<sup>13</sup> Husnul Hatimah, Analisis Kinerja Perangkat Desa Terhadap Penggunaan Dana Desa Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Watatu Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala), Alumni Mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, Skripsi 2020.

perencanaan yang di lakukan atas alokasi dana Desa oleh pemerintah Desa Ngatabaru tidak berjalan dengan baik karena tidak mempertimbangkan masalah yang akan terjadi pada saat pelaksanaan program-program kegiatan. Pengorganisasian yang di lakukan oleh pemerintah Ngatabaru belum berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing karena faktor sumber daya manusia yang tidak memadai.<sup>14</sup>

**Tabel 2.1** Penelitian Terdahulu

<b>NAMA PENELITI</b>	<b>JUDUL PENELITIAN</b>	<b>PERSAMAAN</b>	<b>PERBEDAAN</b>
I Arianto	Analisis kinerja aparatur desa dalam pengelolaan Dana Desa Taunca	1. Metode Penelitian yang digunakan 2. Sama-sama meneliti tentang Analisis Kinerja aparatur desa	- Objek yang diteliti
Serlia R Lamandasa	Analisis kinerja aparatur desa dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di Desa Bulili Kecamatan lore selatan.	1. Metode Penelitian yang digunakan 2. Sama-sama meneliti tentang Analisis Kinerja aparatur desa	- Objek yang diteliti
Reski wahdani	Analisis kinerja aparatur desa jonjo kecamatan parigi kabupaten gowa	1. Metode Penelitian yang digunakan 2. Sama-sama meneliti tentang Analisis Kinerja aparatur desa	- Objek yang diteliti

<sup>14</sup> Sumiati Jurnal Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, Universitas Tadulako, 2020.

Husnul Hatimah	Analisis Kinerja Perangkat Desa Terhadap Penggunaan Dana Desa Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Watatu Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala).	1. Metode Penelitian yang digunakan 2. Sama-sama meneliti tentang Analisis Kinerja aparatur desa	- Objek yang diteliti
Sumiati	Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi	1. Metode Penelitian yang digunakan 2. Sama-sama meneliti tentang Analisis Kinerja aparatur desa	- Objek yang diteliti

## Kajian teori

### B. Kinerja

#### 1. Pengertian Kinerja

Kinerja adalah hasil dari suatu proses yang mengacu dan diukur selama periode waktu tertentu berdasarkan ketentuan atau kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan manajemen kinerja adalah aktivitas untuk memastikan bahwa sasaran organisasi telah dicapai secara konsisten dalam cara-cara yang efektif dan efisien.<sup>15</sup>

Menurut Mangkunegara, kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

<sup>15</sup>Reski wahdani, Analisis kinerja aparatur desa jonjo kecamatan parigi kabupaten gowa, Skripsi Universitas muhammadiyah Makassar, (2021).

Ditambahkan oleh Edison, kinerja adalah hasil dari suatu proses yang mengacu dan diukur selama periode waktu tertentu berdasarkan ketentuan atau kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Sutrisno kinerja adalah kesuksesan seseorang dalam melaksanakan tugas, hasil kerja yang dapat dicapai seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing atau tentang bagaimana seseorang diharapkan dapat berfungsi dan berperilaku sesuai dengan tugas yang telah dibebankan kepadanya serta kuantitas, kualitas dan waktu yang digunakan dalam menjalankan tugas. Dapat disimpulkan bahwa kinerja seseorang ditentukan oleh kemampuan dan motivasinya untuk melaksanakan pekerjaan. Kinerja juga dapat diartikan sebagai kualitas, kuantitas, dan waktu yang digunakan dalam menjalankan tugas. Kuantitas adalah hasil yang dapat dihitung sejauh mana seseorang dapat berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sedangkan kualitas adalah bagaimana seseorang menjalankan tugasnya.<sup>16</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah kerja seseorang dalam sebuah organisasi perusahaan berdasarkan atas kemampuan dan pengetahuan. Hasil kerja yang dicapai oleh seseorang haruslah dapat memberikan kontribusi yang penting bagi perusahaan yang dilihat dari segi kualitas dan kuantitas yang dirasakan oleh perusahaan dan sangat besar manfaatnya bagi kepentingan perusahaan dimasa sekarang dan yang akan datang.

---

<sup>16</sup>Reski wahdani, Analisis kinerja aparatur desa jonjo kecamatan parigi kabupaten gowa, Skripsi Universitas muhammadiyah Makassar, (2021).

Kinerja menurut perspektif islam merupakan bentuk atau cara individu dalam mengkualifikasikan diri. Kinerja merupakan bentuk nyata dari nilai, kepercayaan dan pemahaman yang dianut serta dilandasi prinsip-prinsip moral yang kuat dan menjadi motivasi untuk melahirkan karya bermutu<sup>17</sup>

Dalam Al-Qur'an surah Al-Mulk Ayat 2

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۗ وَهُوَ الْعَفُورُ الْعَزِيزُ

Terjemahan :

Yang menciptakan mati dan hidup, untuk menguji kamu, siapa diantara kamu yang lebih baik amalnya. Dan dia Maha Perkasa, Maha Pengampun.<sup>18</sup>

Maksud dari ayat ini adalah para pekerja harus selalu meningkatkan daya pikirnya, sehingga memiliki wawasan dan daya yang antisipasi yang kuat. Daya pikir seseorang dapat ditingkatkan dengan cara : rajin membaca dan mencatat ilmu, rajin mendengarkan, selalu berusaha, banyak berpikir, meneliti, memecahkan masalah dan lingkungan, rajin mengikuti pelatihan, semangat keingintahuan.<sup>19</sup>

Kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi atau perusahaan serta mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan operasional.<sup>20</sup>

Dalam Al-Qur'an surah Al-Qashâsh Ayat 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Terjemahan :

Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. (Al-Qashâsh/26)

<sup>17</sup>Kementerian Republik Indonesia, Mushaf Al-Qur'an Terjemah, (Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2014), h.562

<sup>18</sup>Ibid

<sup>19</sup>Muhammad, Etika Bisnis Islam, (Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2004), h. 265

<sup>20</sup>Ibid

Aparatur desa dalam melaksanakan pelayanan publik harus menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat agar adanya kepuasan masyarakat dari kinerja aparatur desa. Menjadi seorang aparatur desa memang tidak mudah karena harus memiliki sikap yang sopan santun serta mendahulukan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi serta harus adil dalam mengambil keputusan.<sup>21</sup>

## **2. Indikator Kinerja**

Indikator Kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Kualitas pekerjaan. Seberapa baik seorang karyawan mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan.
- b. Kuantitas Kerja. Seberapa lama seseorang pegawai bekerja dalam satu harinya. Kuantitas kerja ini dapat dilihat dari kecepatan kerja setiap pegawai itu masing-masing.
- c. Pelaksanaan Tugas. Seberapa jauh karyawan mampu melakukan pekerjaannya dengan akurat atau tidak ada kesalahan.
- d. Tanggung Jawab. Kesadaran akan kewajiban melakukan pekerjaannya dengan akurat atau tidak ada kesalahan.<sup>22</sup>

## **3. Tujuan kinerja**

Penilaian kerja adalah proses organisasi dalam mengevaluasi pelaksanaan kerja karyawan. Dalam penilaian dinilai kontribusi karyawan

---

<sup>21</sup>Reski wahdani, Analisis kinerja aparatur desa jonjo kecamatan parigi kabupaten gowa, Skripsi Universitas muhammadiyah Makassar, (2021).

<sup>22</sup>Ibid

kepada perusahaan/kantor selama periode tertentu. Umpan balik kinerja memungkinkan karyawan mengetahui seberapa baik bekerja jika dibandingkan dengan standar perusahaan. Kinerja karyawan pada dasarnya adalah hasil kerja karyawan selama periode tertentu. Pemikiran tersebut dibandingkan dengan target/sasaran yang telah disepakati bersama. Tentunya dalam penilaian tetap mempertimbangkan berbagai keadaan dan perkembangan yang mempengaruhi kinerja tersebut. Widodo (2015:145), menyebutkan bahwa penilaian kinerja terdiri dari 4 kriteria, yaitu :

- a. Relevan artinya ukurannya harus cocok dengan karakteristik pekerjaan yang dinilai.
- b. Bermakna artinya kriteria yang digunakan harus berhubungan dengan tujuan perusahaan/organisasi.
- c. Praktis artinya ukuran harus dapat secara efektif dan efisien dilakukan.
- d. Tidak bias artinya elemen yang diukur harus didasarkan karakteristik pekerjaannya bukan orangnya.<sup>23</sup>

## **C. Pengelolaan dana desa**

### **1. Pengertian pengelolaan**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, bahwa dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/Kota yang dalam pembagiannya untuk tiap desa dibagikan secara proporsional yang disebut sebagai Dana Desa. Pengelolaan dana desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang

---

<sup>23</sup> ibid

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 20, adalah Pengelolaan dana desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa yakni keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.<sup>24</sup>

Dana Desa merupakan dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota (PP No. 72 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 11). Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota yang dalam pembagiannya untuk tiap desa dibagikan secara proporsional. Dalam pengelolaan keuangan desa, pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan adalah Kepala Desa. Kepala Desa bertugas untuk menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa, menetapkan PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa), menetapkan petugas pemungutan penerimaan desa, menyetujui pengeluaran yang ditetapkan dalam APB Desa, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa (Permendagri No. 113 Tahun 2014).<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Dicky Dimas adi pamungkas,yusuf, Hubungan peran pemerintah Desa dan partisipasi masyarakat dengan pengelolaan ADD didesa klodran colomadu karanganyar, *jurnal global citizen* ,2 Nomor 2. Desember (2016) 46

<sup>25</sup> Serlia Raflesia Lamandasa1 , Seprianus Ntada2 Analisis Kinerja Aparatur Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa(Add) Di Desa Bulili Kecamatan Lore Selatan, *Jurnal Eksklusif*, 1, No 1, (2017).

Adapun Dasar Hukum Dana Desa adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, BAB VIII Keuangan Desa dan Aset Desa , Bagian Kesatu (Keuangan Desa, Pasal 71-75) dan bagian kedua (Aset Desa, Pasal 76-77).
2. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; Pengelolaan ADD meliputi tiga kegiatan utama yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan laporan pertanggungjawaban.<sup>26</sup>

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pasal 18 menyebutkan bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen).

Dalam pasal 19 terdapat tujuan Alokasi Dana Desa adalah:

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.

---

<sup>26</sup> ibd

3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan.
4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
8. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).<sup>27</sup>

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan, bahwa sebagai daerah otonomi, desa memiliki kewenangan-kewenangan sebagai berikut :

1. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa.
2. Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa.
3. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah propinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota.
4. Urusan pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.<sup>28</sup>

Dana Desa (Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Dana merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima

---

<sup>27</sup> Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*, (Jakarta: Pemerintah Pusat, 2007) 25.

<sup>28</sup> *ibid*

kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.<sup>29</sup>

## 6. Implementasi Manajemen

### a. Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Dalam pengertian bahasa, Implementasi juga bisa berarti pelaksanaan yang berasal dari kata bahasa Inggris Implement yang berarti melaksanakan.<sup>30</sup> Terdapat berbagai pendapat para ahli dan akademisi yang mengemukakan tentang pengertian dari implementasi. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>31</sup> Muhammad Joko Susila bahwa implementasi merupakan suatu penerapan ide konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga mendapatkan dampak, baik berupa dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, ketrampilan, mampu nilai dan sikap.<sup>32</sup> Menurut Wheelen Dan Hunger implementasi adalah suatu

---

<sup>29</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 72 ayat (1) point (d) dan butir (4), Jakarta: Pemerintah Pusat, (2014),41.

<sup>30</sup> E. Mulyasa, *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, Jakarta, Bumi Aksara, 2013, 56.

<sup>31</sup> Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta, 2002, Hal. 70.

<sup>32</sup> Muhammad Fathurrohman dan Sulistyorini, *Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Islam Peningkatan Lembaga Pendidikan Islam Secara Holistik*, (Yogyakarta: Teras, 2012), 189-191

proses untuk menempatkan dan menerapkan informasi dalam operasi, sementara Van Meter & Van Horn mengatakan implementasi ialah pelaksanaan tindak oleh individu, pejabat, instansi pemerintah, maupun kelompok swasta dengan tujuan untuk menggapai cita-cita yang telah digariskan dalam keputusan tertentu. Hamdan berpendapat bahwa tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh sekelompok individu yang sudah ditunjuk dalam penyelesaian suatu tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya Menurut pendapat Griled pada Mulyadi ia menyatakan bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan administrative yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu, juga dikemukakan oleh Gordon, implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Guntur Setiawan mengemukakan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif.<sup>33</sup> Bahwa dapat disimpulkan implementasi ialah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan normanorma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, implelementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya yaitu kurikulum. Implementasi kurikulum merupakan proses pelaksanaan ide, program atau aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan

---

<sup>33</sup> Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Balai Pustaka, Jakarta, 2004.39

melakukan perubahan terhadap suatu pembelajaran dan memperoleh hasil yang diharapkan.

b. Factor-faktr yang mempengaruhi implementasi

Keberhasilan implementasi menurut Merile S. Grindle dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). Variabel isi kebijakan ini mencakup.<sup>34</sup>

- 1) Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan.
- 2) jenis manfaat yang diterima oleh target group, sebagai contoh, masyarakat di wilayah slumareas lebih suka menerima program air bersih atau perlistrikan daripada menerima program kredit sepeda motor.
- 3) Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan.
- 4) Apakah letak sebuah program sudah tepat.

Van Meter dan Van Horn (dalam buku Winarno), menggolongkan kebijakan-kebijakan menurut karakteristik yang berbeda dalam proses implementasi berlangsung.<sup>35</sup>

- 1) Implementasi akan di pengaruhi oleh sejauh mana kebijakan menyimpang dari kebijakan-kebijakan sebelumnya perubahan-perubahan incremental lebih cenderung menimbulkan tanggapan

---

<sup>34</sup> Merile S. Grindle (Dalam Buku Budi Winarno). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo, Yogyakarta, 2002. 21.

<sup>35</sup> merile S. Grindle (Dalam Buku Budi Winarno). *Teori dan ProsesKebijakan Publik*, Media Pressindo, Yogyakarta, 2002. 179

positif daripada perubahan-perubahan drastis (rasional), seperti dikemukakan sebelumnya perubahan inkremental yang didasarkan pada pembuatan keputusan secara inkremental pada dasarnya merupakan remedial dan diarahkan lebih banyak kepada perbaikan terhadap ketidak sempurnaan sosial yang nyata sekarang ini dari pada mempromosikan tujuan sosial dari masa depan. Hal ini sangat berbeda dengan perubahan yang didasarkan pada keputusan rasional yang lebih berorientasi pada perubahan besar dan mendasar. Akibatnya peluang terjadi konflik maupun ketidak sepakatan antara pelaku pembuat kebijakan akan sangat besar.

2) Proses implementasi akan dipengaruhi oleh jumlah perubahan organisasi yang diperlukan. Implementasi yang efektif akan sangat mungkin terjadi jika lembaga pelaksana tidak diharuskan melakukan perubahan secara drastis. Kegagalan program-program sosial banyak berasal dari meningkatnya tuntutan yang dibuat terhadap struktur-struktur dan prosedur-prosedur administratif yang ada.

### c. Manajemen

Manajemen berasal dari bahasa Inggris management dengan kata kerja to manage yang secara umum berarti mengurus. Dalam arti khusus manajemen dipakai bagi pemimpin dan kepemimpinan, yaitu orang-orang yang melakukan kegiatan memimpin. Dengan demikian manajer ialah orang yang memimpin atau pemimpin. Manajemen menurut

Stoner adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Manajemen didefinisikan sebagai proses karena semua manajer, tanpa memperdulikan kecakapan atau ketrampilan khusus mereka, harus melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan-tujuan yang mereka inginkan. Proses tersebut terdiri dari kegiatan-kegiatan manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan.<sup>36</sup> Manajemen adalah bidang yang sangat penting untuk dipelajari dan dikembangkan karena:

- a. Tidak ada perusahaan/perkantoran yang dapat berhasil tanpa menerapkan manajemen secara baik.
- b. Manajemen menetapkan tujuan, usaha untuk mencapai tujuan serta memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien.
- c. Manajemen mengakibatkan pencapaian tujuan atau hasil secara teratur.
- d. Manajemen perlu untuk kemajuan dan pertumbuhan.
- e. Manajemen merupakan suatu pedoman pikiran dan tindakan.

Mengapa manajemen diperlukan ? Agar tujuan dari organisasi dapat dicapai secara efektif dan efisien. Apa yang dimaksud dengan efektif dan efisien ?

---

<sup>36</sup> Dr. Muslichah Erma Widiana, Dra.Ec., Buku Ajar Pengantar Manajemen. Penerbit CV. Pena Persada..jawa tengah.2020.<http://eprints.ubhara.ac.id/1291/1/E-Book%20Pengantar%20Manajemen.pdf>.

Efektif menurut Peter F. Drucker adalah "mengerjakan pekerjaan yang benar" (doing the right things). Sedangkan efisien menurutnya adalah "mengerjakan pekerjaan dengan benar" (doing things right). Efisiensi merupakan bagian yang terpenting dalam manajemen. Efisiensi itu mengacu pada hubungan antara keluaran dan masukan (output/input). Efektivitas dan efisien merupakan indikator utama sebuah organisasi dikatakan baik dan berhasil. Dalam bahasa yang lebih sederhana efisiensi itu menunjukkan kemampuan organisasi dalam menggunakan sumber daya dengan benar dan tidak ada pemborosan. Setiap perusahaan akan berusaha mencapai tingkat output dan input yang seoptimal mungkin.<sup>37</sup>

Manajemen publik (public management) adalah faktor utama dalam suatu administrasi publik (public administration) untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan sarana dan prasarana yang ada, termasuk organisasi serta sumber dana dan sumber daya manusia yang tersedia. Dengan demikian, manajemen pemerintahan tidak lain adalah faktor upaya dalam suatu organisasi. Upaya tersebut diwujudkan dalam berbagai kegiatan pemerintah yang mencakup berbagai aspek kehidupan dan penghidupan warga negara dan masyarakatnya.<sup>38</sup>

Indikator Manajemen publik mengalami transisi dengan beberapa indikator terpenting yaitu :

---

<sup>37</sup> Dr. Muslichah Erma Widiana, Dra.Ec., Buku Ajar Pengantar Manajemen. Penerbit CV. Pena Persada..jawa tengah.2020. <http://eprints.ubhara.ac.id/1291/1/E-Book%20Pengantar%20Manajemen.pdf>.

<sup>38</sup> Rara Karlina. Manajemen Publik Kantor Desa Pamarunan Dalam Memberikan Pelayanan Satu Atap Kepada Masyarakat (Studi Di Kantor Desa Pamarunan, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau).2020 <http://e-journal.upr.ac.id>

- a. Manajemen publik sebagai privatisasi suatu alternatif bagi pemerintah untuk memberikan pelayanan public.
- b. Manajemen publik sebagai rasionalitas dan akuntabilitas
- c. Manajemen publik sebagai perencanaan dan control
- d. Manajemen publik sebagai keuangan dan penganggaran\
- e. Manajemen publik sebagai produktivitas sumber daya manusia

## **D. Desa**

### **1. Pengertian Desa**

Desa dalam bahasa Sansekerta berarti "Deshi", yang berarti tanah air. Oleh karena itu, desa dapat dilihat tidak hanya dari tampilan nama desa yang sebenarnya, namun dari dimensi sosial budaya. Desa artinya tempat lahir, selain menunjukkan suatu tempat ataupun wilayah, juga mendeskripsikan kehidupan sosial budaya serta aktivitas penduduknya. Nama desa yang berbeda di beberapa daerah.

Desa ialah bentuk pemerintahan terkecil di negara ini. Luas desa umumnya tidak terlalu besar, serta beberapa keluarga tinggal di dalamnya. Umumnya penduduk bekerja di sektor pertanian, serta tingkat pendidikan mereka rendah. Sebab tidak banyak ikatan darah, hubungan antar manusia biasanya sangat kuat. Masyarakat masih mempercayai dan menganut adat dan tradisi yang ditinggalkan oleh nenek moyangnya.

Definisi desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terkait desa menjelaskan bahwasanya “desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan menerus

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.<sup>39</sup>

Desa Berkembang adalah desa potensial menjadi desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.

Desa Maju adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan. Desa Mandiri adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.<sup>40</sup>

Dari beberapa pengertian dan definisi di atas, kesimpulan yang dapat diambil mengenai beberapa ciri kehidupan di desa adalah sebagai berikut:

- a. Kehidupan bersifat tradisional.
- b. Kehidupan sangat dekat dengan lingkungan alam.
- c. Luas daerah tidak terlalu besar serta jumlah penduduknya tidak terlalu banyak.

---

<sup>39</sup> Undang-undang No.6 Tahun 2014 *tentang Desa* Pasal 72 ayat (1)

<sup>40</sup> Permendes, PDT, dan Transmigrasi RI No.21 Tahun 2016 *tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015*, Permendes No.B Tahun 2016. <http://www.kemenkeu.go.id/dana-desa>

- d. Masyarakat desa adalah suatu perkumpulan, suatu cara hidup yang dilandasi oleh hubungan kekeluargaan yang kuat.
- e. Masyarakat desa pada umumnya masih memegang norma-norma agama secara kuat.
- f. Memiliki sistem komunitas sendiri.
- g. Memiliki wilayah sendiri.
- h. Sifat gotong royong masih tertanam kuat pada warga masyarakat desa.
- i. Struktur ekonominya adalah pertanian.
- j. Tata pemerintahan dipimpin oleh kepala desa yang dipilih oleh rakyatnya.<sup>41</sup>

## **2. Prioritas Pembangunan Desa**

Berdasarkan peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi republik indonesia nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020, yang termasuk prioritas dalam bidang pembangunan desa adalah sebagai berikut:

- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana desa.<sup>42</sup>
  - 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan pemukiman, antara lain.
    - a) Pembangunan dan perbaikan rumah untuk warga miskin.

---

<sup>41</sup> Icku Ranga Bawono dan Erwin Setyadi, *Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa* Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2019.1-3

<sup>42</sup> Muhamad Mu'iz Raharjo. *Pengelolaan Dana Desa*, ( Jakarta: Diterbitkan PT Bumi Aksara2021). 22-23

- b) Penerangan lingkungan pemukiman; pedestrian; drainase;selokan.
  - c) Tandon air bersih atau penampung air hujan bersama, pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih kerumah penduduk, sumur resapan.
  - d) Alat pemadam kebakaran hutan dan lahan, pembangunan ruang terbuka hijau.
  - e) Tempat pembuangan sampah,gerobak sampah, pengangkut sampa, mesin pengola sampah pebangunan bank sampah desa, dan
  - f) Sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawara desa.
- 2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
- a) Perahu/ketinting bagi desa-desa dikepulauan dan kawasan DAS, tambatan perahu, dermaga apung.
  - b) Jalan pemukiman, jalan desa antara pemukiman ke wilayah pertanian, jalan poros desa, jalan desa antara pemukiman kelokasi wisata.
  - c) Jembatan desa, gorong-gorong
  - d) Terminal desa
  - e) Sarana prasarana trasportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawara desa.

- 3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana energi, antara lain:<sup>43</sup>
  - a) Pembangkit listrik tenaga mikrohidro, pembangkit listrik tenaga diesel, pembangkit listrik tenaga matahari, pembangkit listrik tenaga angin.
  - b) Instalasi biogas, jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari PLN) dan
  - c) Sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawara desa.
- b. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar.<sup>44</sup>
  - 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
    - a) Air bersih berskala desa, jambanisasi, mandi, cuci.
    - b) Mobil/kapal motor untuk ambulance desa.
    - c) Balai pengobatan, posiandu, poskesdes/polindes, posbindu.
    - d) Tikar pertumbuhan (alat ukur tinggi badan untuk bayi) sebagai media deteksi dini stunting.
    - e) Kampanye desa bebas BAB sembarangan (BABS) dan
    - f) Sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawara desa.

---

<sup>43</sup> Muhamad Mu'iz Raharjo. *Pengelolaan Dana Desa*, ( Jakarta: Diterbitkan PT Bumi Aksara.2021). 23-24

<sup>44</sup> Muhamad Mu'iz Raharjo. *Pengelolaan Dana Desa*, ( Jakarta: Diterbitkan PT Bumi Aksara.2021). 24

- 2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:<sup>45</sup>
- a) Taman bacaan masyarakat, taman belajar keagamaan, bangunan perpustakaan desa, buku/bahan bacaan.
  - b) Bangunan PAUD bagi desa yang belum ada PAUD, pengembangan bangunan/rehabilitasi gedung PAUD untuk PAUD HI, buku dan peralatan belajar PAUD lainnya, wahana permainan anak di PAUD.
  - c) Pembangunan atau renovasi sarana oleh raga desa, balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat, gedung sanggar seni/ruang ekonomi kreatif, film dokumentar, pembuatan galeri atau museum desa, peralatan kesenian dan kebudayaan.
  - d) Sarana prasarana bermain dan kreatifitas anak, pengadaan media komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) terkait hak anak, gizi, dan kesehatan ibu dan anak serta isu anak lainnya, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di desa, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah yang aman bagi anak dan.
  - e) Sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawara desa.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi desa:

---

<sup>45</sup> Muhamad Mu'iz Raharjo, *Pengelolaan Dana Desa*, ( Jakarta: Diterbitkan PT Bumi Aksara, 2021).25

- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan pengelolaan hasil usaha pertaniandan perikanan untuk ketahanan pangan dan usaha hasil pertanian atau perikanan untuk ketahanan pangan dan usahapertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
  - a) Embung desa. Bendungan berskala kecil, pembangunan atau perbaikan embung, irigasi desa, pencetakan lahan pertanian, kolam ikan.
  - b) Kapal penangkap ikan, tempat pendaratan kapal penangkap ikan.
  - c) Kandang ternak, mesin pakan ternak, mesin penetas telur.
  - d) Gudang penyimpanan sarana produksi pertanian, pengeringan hasil pertanian.
  - e) Keramba jaring apung, keranjang ikan alat timbang dan ukur hasil penangkapan, alat produksi es dan gudang desa.<sup>46</sup>

## **E. Dana Desa**

### **1. Pengertian Dana Desa**

Dana desa didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan desa pada dasarnya merupakan sub

---

<sup>46</sup> Muhamad Mu'iz Raharjo, *Pengelolaan Dana Desa*, ( Jakarta: Diterbitkan PT Bumi Aksara, 2021). 25

sistem dari keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2003, tentang keuangan negara. Dalam penjelasan undang-undang tersebut dinyatakan bahwa pendekatan yang digunakan dalam merumuskan keuangan negara adalah dari sisi objek, subjek, proses dan tujuan. Dari sisi objek yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi semua hak kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.

Dari sisi subjek yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi seluruh subjek yang memiliki/menguasai objek sebagaimana tersebut diatas, yaitu: pemerintah pusat, pemerintah daerah perusahaan negara/daerah dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Sementara dari sisi proses keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana tersebut diatas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggung jawaban. Sedangkan dari sisi tujuan, keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan penguasaan objek sebagaimana tersebut diatas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dana Desa merupakan dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota (PP No. 72 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 11). Dana Desa Menurut Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota yang dalam pembagiannya untuk tiapdesa dibagikan secara proporsional. Dalam pengelolaan keuangan desa, pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan adalah Kepala Desa. Kepala Desa bertugas untuk menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa, menetapkan PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa), menetapkan petugas pemungutan penerimaan desa, menyetujui pengeluaran yang ditetapkan dalam APB Desa, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa (Permendagri No. 113 Tahun 2014).<sup>47</sup>

Adapun Dasar Hukum Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, BAB VIII Keuangan Desa dan Aset Desa , Bagian Kesatu (Keuangan Desa, Pasal 71-75) dan bagian kedua (Aset Desa, Pasal 76-77)
2. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;

---

<sup>47</sup> Serlia Raflesia Lamandasa<sup>1</sup> , Seprianus Ntada<sup>2</sup> Analisis Kinerja Aparatur Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Bulili Kecamatan Lore Selatan, *Jurnal Eksklusif*, 1, No 1, (2017).

Pengelolaan ADD meliputi tiga kegiatan utama yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan laporan pertanggungjawaban.<sup>48</sup>

## 6. Ruang Lingkup Dana Desa

Adapun ruang lingkup keuangan desa meliputi:

- a. Hak desa untuk melakukan pungutan berdasarkan peraturan desa.
- b. Kewajiban desa untuk menyelenggarakan pemerintahan desa dan membayar tagihan pihak ke tiga.
- c. Penerimaan desa.
- d. Pengeluaran desa
- e. Kekayaan desa yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada badan usaha milik desa.
- f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah desa dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan atau kepentingan umum.<sup>49</sup>

Dalam teori mengenai pengelolaan anggaran desa, sujarweni (2015) secara rinci menyebutkan akan manfaat penyusunan kinerja pengelolaan anggaran desa,<sup>50</sup> yakni sebagai berikut:

- a. Memberikan kewenanga pada pemerintahan desa dalam menyelenggarakan administrasi desa, yang menurut Sondang P.Siagian, administrasi adalah keseluruhan proses kerja sama antaradua orang atau

---

<sup>48</sup> ibid

<sup>49</sup> Heru Rochansjah. Pengelolaan keuanan desa. FOKUSMEDIA bandung. 2014

<sup>50</sup> Ibid. 46

lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>51</sup>

- b. Sebagai panduan bagi pemerintah desa dalam menentukan strategi kegiatan operasional dengan melihat kebutuhan dan ketersediaan sumber daya.
- c. Sebagai salahsatu idikator untuk menentukan besarnya biaya pelayan yang akan dibebankan kepada masyarakat.
- d. Bahan pertimbangan untuk menggali sumber pendapatan lain.
- e. Memberikan arahan bagi pemerintahan desa dalam penyelenggaraan dan pengawasan pemerintahan desa.
- f. Menggambarkan kebijakan pembangunan desa dalam suatu periode anggaran.
- g. Melalui perencanaan yang matang dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.

Berdasarkan UU No.6 Tahun 2014 tentang Dana Desa terdapat tujuh sumber pendapatan desa diantaranya berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).<sup>52</sup> Pendapatan desa berasal dari alokasi APBN saat ini dikenal sebagai Dana Desa. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan

---

<sup>51</sup> Ali Mufiz, *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*, Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka, 2011, 1-5.

<sup>52</sup> Ibid.1-5

pemberdayaan masyarakat. Adanya dana desa merupakan salah satu implementasi visi kerangka NKRI. Pengalokasian dana desa dilakukan dengan menggunakan alokasi dibagi secara merata dan alokasi yang dibagi berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan tingkat kesulitan geografis.<sup>53</sup>

Dana desa yang bersumber dari APBN diperuntukan bagi desa ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dimulai sejak tahun 2015. Penyaluran dana desa diharapkan dapat meningkatkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan desa dengan meningkatkan pelayanan energi di desa, memajukan perekonomian desa, menutup kesenjangan pembangunan antar desa, dan memperkuat masyarakat desa sebagai badan utama pembangunan.<sup>54</sup>

## **7. Penggunaan dana desa**

Belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah Daerah Kabupaten/kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah.<sup>13</sup> Sebagai dasar hukum agar belanja desa sesuai dengan prioritas pemerintah, pada tahun 2015 ditetapkan peraturan menteri desa, PDT, Transmigrasi RI No.21 Tentang penetapan prioritas penggunaan dana

---

<sup>53</sup> Permendesa, PDT, dan Transmigrasi RI No.21 Tahun 2016 *tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015*, Permendesa No.B Tahun.2016. <http://www.kemenkeu.go.id/dana-desa>

desa tahun 2016 dan permendesa No.8 Tahun 2016 penggunaan dana desa ada 4 bidang sebagai berikut:

- a. Bidang pelaksanaan pembangunan desa, yang terdiri dari:
  - 1) Pemenuhan kebutuhan dasar
- b. Sarana prasarana desa
- c. Pengembangan ekonomi lokal.
- d. Pemanfaatan SDA dan lingkungan.
  - 1) Bidang pembinaan kemasyarakatan.
  - 2) Bidang pemberdayaan masyarakat.
  - 3) Bidang penyelenggaraan pemerintah desa.

Prioritas penggunaan dana desa untuk pelaksanaan rencana dan kegiatan pembangunan desa mencakup:

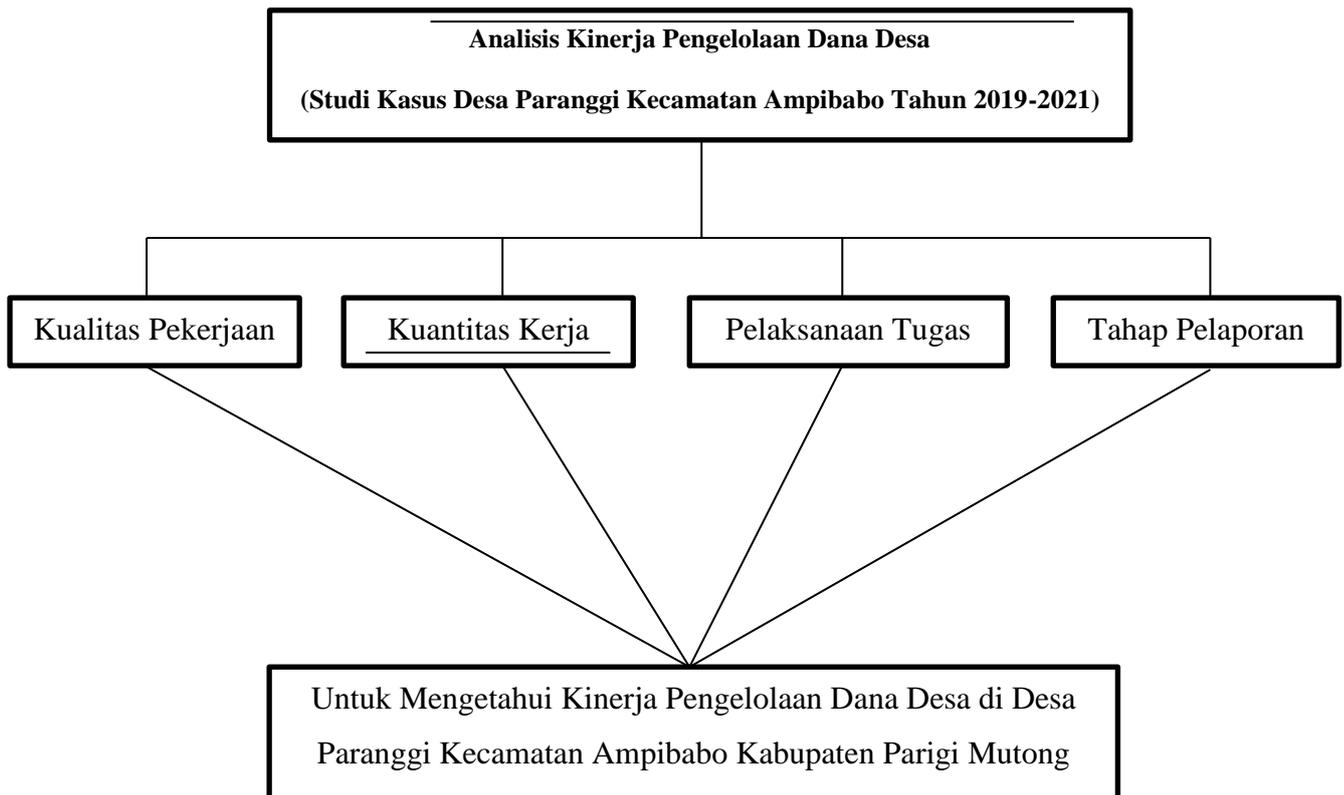
- a. Kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur energi baru dan perlindungan lingkungan.
- b. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan insfrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan, dan permukiman.<sup>55</sup>
- c. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan, sarana dan prasarana kesehatan masyarakat.
- d. Pengembangan usaha ekonomi kerakyatan, termasuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur produksi dan distribusi.

---

<sup>55</sup> Muhamad Mu'iz Raharjo, *Pengelolaan Dana Desa*, Jakarta: Diterbitkan PT Bumi Aksara, 2021. 3-4

- e. Pengembangan, pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, energi dan kebudayaan.

#### F. Kerangka Pikir



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Desain Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan eskripsi. dengan tujuan data yang diambil peneliti merupakan data yang jelas dan sesuai dengan keadaan ditempat yang menjadi objek penelitian.

Digunakannya penelitian kualitatif karena :

- 1) Dilakukan pada kondisi alamiah. langsung ke sumber data dan penelitian merupakan instrumen kunci
- 2) Lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata sehingga tidak menekankan angka-angka.
- 3) Lebih menekankan pada proses dari pada produk atau *outcome*.
- 4) Dilakukan analisis data secara induktif
- 5) Lebih menekankan makna.<sup>56</sup>

Dengan menggunakan penelitian kualitatif didasarkan pada judul penelitian, serta data-data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar atau dokumen lain, dan peneliti juga bertatap muka langsung dengan informan. Sehingga dalam hasil penelitian ini memberikan analisis yang berkaitan dengan pelaksanaan kinerja dalam pengelolaan keuangan desa parangg.

---

<sup>56</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 22

## **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Paranggi, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong.

## **C. Kehadiran Peneliti**

Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah pengumpul data, orang yang ahli dan memiliki kesiapan penuh untuk memahami situasi, peneliti sekaligus sebagai instrumen. Penelitian kualitatif juga “Penelitian Subjektif” atau “Penelitian Reflektif”, dimana peneliti melakukan pengujian sendiri secara praktis selama proses penelitian.

Sehingga kehadiran peneliti merupakan sesuatu yang penting dan mutlak pada lokasi yang dijadikan objek penelitian.

## **D. Data dan Sumber Data**

Data dan sumber data merupakan faktor penentu keberhasilan suatu penelitian. Suatu penelitian tidak dapat dikatakan bersifat ilmiah bila tidak ada data yang dipercaya.

Dalam survei penelitian, tidaklah harus diteliti semua individu yang ada dalam populasi objek tersebut. Dalam hal ini hanya diperlukan sampel atau contoh sebagai representatif objek penelitian. Oleh karena itu, persoalan penting dalam

pengumpulan data yang harus diperhatikan adalah “bagaimana dapat dipastikan atau diyakini bahwa sampel yang ditetapkan adalah representatif”.<sup>57</sup>

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua jenis, yaitu:

1. Data Primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik individu maupun perseorangan seperti hasil dari wawancara yang biasa dilakukan oleh penelitian.<sup>58</sup>
2. Data Sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer maupun orang lain.<sup>59</sup> Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari data yang dihimpun melalui teknik mengamati dan dokumentasi yang menunjukkan gambaran umum tentang pelaksanaan pengelolaan anggaran desa ditinjau dalam perspektif Ekonomi Islam.
3. Dalam hal ini peneliti juga menggunakan buku-buku yang ada di Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Jurnal Penelitian, Buku Panduan, serta buku-buku yang berhubungan dengan judul skripsi

---

<sup>57</sup>Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet.10; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 77.

<sup>58</sup>Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Cet.12 ; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 42

<sup>59</sup>Ibid., 43.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Keberadaan data mutlak diperlukan dalam sebuah penelitian untuk menjawab semua permasalahan dalam penelitian, kita sangat membutuhkan data dari berbagai sumber. Data dapat didefinisikan sebagai sekumpulan informasi.

Selanjutnya untuk memperoleh data atau informasi yang objektif, maka dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

### 1) Teknik Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.<sup>60</sup> Dalam hal ini peneliti melakukan teknik observasi dengan cara melakukan pengamatan terkait dengan pelaksanaan kinerja pengelolaan anggaran desa sebelum ditinjau dalam perpektif Ekonomi Islam .

### 2) Teknik Wawancara

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.<sup>61</sup> Dengan melakukan wawancara kepada pemilik perusahaan, produsen dan kariawan yang bekerja. Menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah di siapkan dan tidak menutup kemungkinan penulis mengembangkan pertanyaan itu agar mendapatkan informasi yang diperlukan. Pihak yang di wawancara yaitu, kepala desa, bendahara, dan masyarakat.

---

<sup>60</sup>Sudaryono, *Metodologi Penelitia*, (Cet.1 : Jakarta Raja Grafindo Persada,2017) . 212.

<sup>61</sup>Ibid., 216.

### 3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, melihat buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumen, data relevan penelitian. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bias berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>62</sup>

4) Dalam teknik pengumpulan data ini penulis melakukan penelitian dengan menghimpun data yang relevan dan sejumlah dokumen resmi, atau arsip penelitian yang dapat menunjang kelengkapan data serta menggunakan kamera sebagai bukti bahwa penelitian benar-benar dilakukan dilokasi yang dimaksud.

## **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan bagi orang lain.<sup>63</sup> Sehingga mudah dipahami dan dimengerti oleh peneliti dan pembaca.

Sejumlah data dan keterangan berhasil dikumpul penulis, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis beberapa data yang diperoleh dalam bentuk analisis deskriptif dengan menggunakan beberapa teknik analisis data antara lain :

### 1) Reduksi Data

---

<sup>62</sup>Ibid., 219

<sup>63</sup>Neong Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Ed, III, Cet. VII, Yogyakarta:Rake Sarasin, 1996), 104.

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak untuk itu perlu dicatat secara teliti dan terperinci. Makin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan makin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.<sup>64</sup>

Reduksi data diterapkan pada hasil, wawancara, observasi dan dokumentasi dengan menyaring kata-kata yang dianggap penulis tidak diperlukan bagi penelitian ini seperti gurauan dan basa-basi informan.

## 2) Penyajian Data

Data yang telah dikumpulkan melalui pengamatan baik terlibat maupun tidak, wawancara mendalam dan dokumentasi, selanjutnya disajikan secara sistematis sehingga mudah dibaca orang lain. Data yang disajikan harus merujuk kepada fokus penelitian.<sup>65</sup>

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.<sup>66</sup> selanjutnya adalah menyajikan kedalam inti pembahasan yang dijabarkan pada hasil penelitian di lapangan, khususnya pada Bab ke IV dari pembahasan Proposal ini.

---

<sup>64</sup>Ibid., 335.

<sup>65</sup>Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cet.3; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013).

<sup>66</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D*, (Cet.17; Bandung: Alfabeta, 2012), 249.

### 3) Verifikasi Data

Dalam verifikasi data kesimpulan awal yang dikemukakan penulis masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada dilapangan.<sup>67</sup>

Untuk sejumlah data dan keterangan yang masuk kedalam pembahasan proposal ini akan diseleksi kebenarannya dan validitasnya, sehingga data yang masuk dalam pembahasan ini adalah data otentik dan tidak diragukan keabsahannya. Dalam sebuah penelitian, verifikasi data yang dilakukan atas pernyataan yang dikemukakan informan.

### **G. Pengecekan Keabsahan Data**

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini dimaksudkan agar tidak terjadi keraguan bagi penulis sendiri maupun para pembaca terhadap penulis itu sendiri yang dimana telah berusaha mencurahkan tenaganya dalam penelitian karya tulis ilmiah ini.

---

<sup>67</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D*, (Cet.17; Bandung: Alfabeta, 2012), 252.

Adapun salah satu teknik pemeriksaan keabsahan data salah satunya adalah Triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.<sup>68</sup>

Teknik Triangulasi yang dimaksudkan penulis, dalam penelitian ini mencakup:

#### 1. Triangulasi Metode

Triangulasi metode dilakukan dengan mengumpulkan data dengan metode lain. Sebagaimana diketahui, dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan survei. Peneliti dapat menggabungkan metode wawancara bebas dan wawancara terstruktur. Peneliti juga menggunakan wawancara dan observasi atau pengamatan untuk mengecek kebenarannya. Selain itu, peneliti juga bisa menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut.

#### 2. Triangulasi Teori

Triangulasi teori adalah dimana hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi atau thesis statement. Informasi tersebut selanjutnya di bandingkan dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang di hasilkan. Singkatnya

---

<sup>68</sup>Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cet.1; Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 22.

yaitu: Triangulasi teori yaitu dilakukan dengan membandingkan data hasil pengamatan dan wawancara dengan teori-teori yang terkait.<sup>69</sup>

### 3. Triangulasi Sumber Data

Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu dengan menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda. Tentu masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (*insights*) yang berbeda pula mengenai fenomena yang di teliti. Berbagai pandangan itu akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran handal.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup>Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian dan Bimbingan Konseling*, (Cet.3; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 76.

<sup>70</sup>Reyvan Maulid Pradistya. *Teknik triangulasi dalam pengolahan data kualitatif*, (Banten:DOLAB, 2009), 43.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Kondisi Desa Paranggi**

##### **1. Sejarah Desa Paranggi**

Desa Paranggi terletak di wilayah pesisir Teluk Tomini Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong. Pada mulanya Desa Paranggi dikenal dengan Nama ogotai dan merupakan bagian dari Desa Ampibabo. Sesuai sejarah bahwa pada awalnya penduduk Desa Paranggi mayoritas adalah para Nelayan dan umumnya bermukim disepanjang posisir yang terdiri dari tiga tempat yaitu Pantai Ogolugus bagian Selatan.

Pantai Ogotai bagian Tengah dan Pantai Simalagemo bagian Utara. Ketiga tempat posisir pantai ini adalah sebagai tempat pemukiman penduduk yang sangat strategis waktu itu bahkan hingga sat ini. Karena ketiganya mempunyai Muara / Alur sungai yang bersih dan dangkal, serta aman sebagai tempat pelabuhan perahu sampan para nelayan.

Selanjutnya setelah Tahun 1967 oleh masyarakat setempat sepakat merubah nama kampung yang mulanya “Ogotai” Menjadi “Paranggi” sejalan dengan perubahan jabatan kepala suku menjadi kepala kampung yang pada waktu itu kembali terjadi pergantian kepala kampung Yaitu : Bapak Hasim Purukana (Kepala Kampung) Tahun 1950-1965 digantikan Bapak Dg. Masiga

(jabatan Kepala Kampung) menjabat Tahun 1965-1967. Kemudian dilanjutkan oleh masa pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Syamsu Ismail sebagai kepala kampung Paranggi yang ketiga setelah peralihan dari jabatan kepala suku, Dan Bapak Go'lamataya menjabat kepala Wilayah kecamatan Ampibabo pada waktu itu. Perubahan nama “Ogotai” menjadi Paranggi yang menjadi kesepakatan masyarakat pada waktu itu disebabkan oleh beberapa hal, antara lain. Yaitu:

- Karena timbulnya pemahaman yang berbeda akibat pengertian bahasa serta penyesuaian sejarah yang tepat.
- Adanya satu tempat kediaman seorang Magau (Pemimpin) dan Keluarganya yang disegani dan dianggap aman sebagai tempat berlindung masyarakat, yang dinamakan “Bamba Mparanggi” yang berarti Tempat sekitar Muara Sungai Paranggi.
- Penyesuaian nama seiring dengan perkembangan Zaman.
- Karena adanya ide/gagasan pemerintah setempat yang disepakati oleh masyarakat.

Sehingga sampai saat ini nama desa ini dikenal dengan sebutan Desa “Paranggi” yang juga dikutip dari bahasa kaili Lauje. Yang oleh suku Lauje Menyebutkan “Paranggi” yang berarti “Peperangan”.<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup> Nursarice (sekretaris Desa) wawancara dengan penulis Paranggi 10 November 2023 bersumber dari RPJMDes 2019

Ditengah masa pemerintahan Bapak Samsu Ismail kembali terjadi perubahan sistem pemerintahan wilayah yaitu nama kampung atau Kepala Kampung dirubah menjadi desa atau Kepala desa. Sehingga sejak saat itulah “Paranggi” dikenal sebagai sebuah desa Difinitif diwilayah Kecamatan Ampibabo yang semula penduduknya adalah suku kaili Lauje kemudian berkembang menjadi mayoritas suku Kaili Rai dengan mata pencaharian utama adalah Nelayan dan Tani. Dan dengan perkembangan Zaman pulalah sampai saat ini penduduk desa paranggi telah terdiri dari berbagai suku yakni ; Kaili Rai sebagai suku Mayoritas, Bugis, Gorontalo dan Jawa.<sup>72</sup>

**tabel 4.1** Kepala Desa Yang Pernah Menjabat Di Desa Paranggi

NO	NAMA	MASA JABATAN
1	Hasim Purukana	Tahun 1950-1965
2	Dg. Masiga Pasaribu	Tahun 1965-1967
3	Samsu Ismail	Tahun 1967-1975
4	Samsu Langgai	Tahun 1975-1984
5	Banti Lahabo	Tahun 1984-1992
6	Juhriansyah Ismail	Tahun 1992-1994
7	Nurdin L, Tjambaru	Tahun 1994-1996
8	Samsu Langgai	Tahun 1996-1998
9	Sapri Monoarfa	Tahun 1998-2002
10	Sudirman L.Habibu	Tahun 2002-Bulan Oktober 2007
11	Damir U. Lahabo, SE	Bulan Oktober 2007-Pebruari 2008

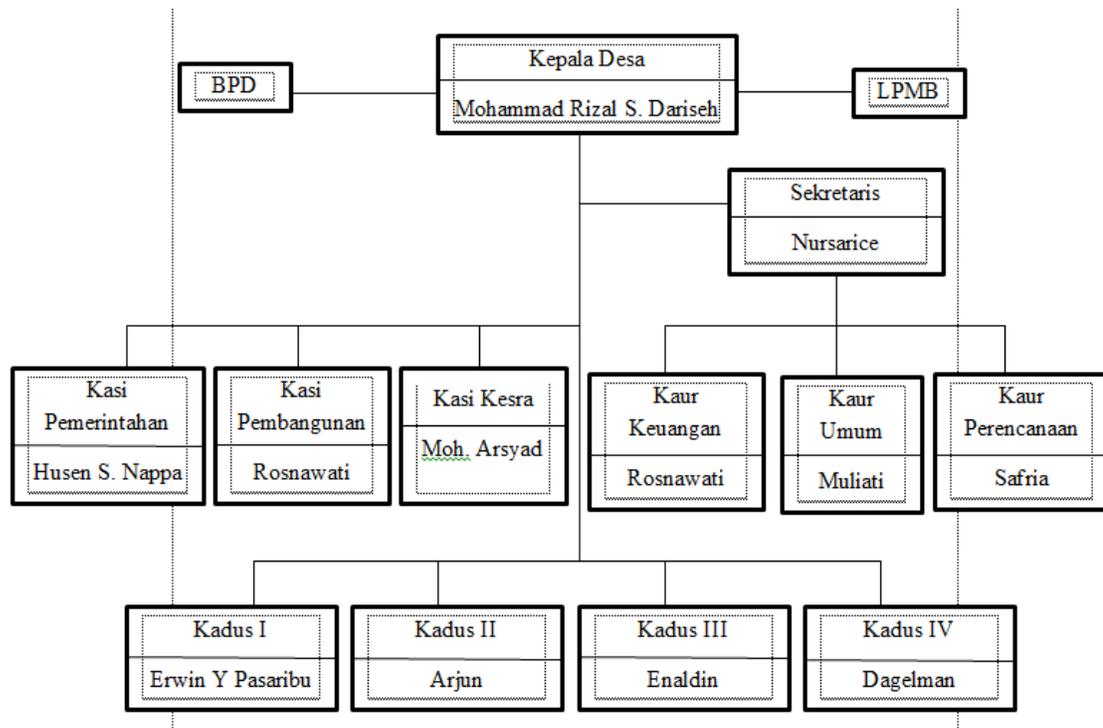
---

<sup>72</sup> Nursarice (sekretaris Desa) wawancara dengan penulis Paranggi 10 November 2023 bersumber dari RPJMDes 2019

12	Sudirman L. Habibu	Bulan Maret 2008 – 2013
13	Asdin Haya	Periode Januari 2014 – Desember 2019
14	Mohamad Rizal S. Dariseh	Periode 2019-2025

Sumber: RPJMDes<sup>73</sup>

### Struktur Pemerintahan Desa/Kelurahan



Sumber: Data Sekunder 2024

### Tugas Dan Fungsi Pemerintah Desa Paranggi Kecamatan Ampibabo

NO	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
1	Kepala desa	Menyelenggarakan pemerintahan desa,	Memimpin penyelenggaraan

<sup>73</sup> Nursarice (sekretaris Desa) wawancara dengan penulis Paranggi 10 November 2023 bersumber dari RPJMDes 2019

		melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.	pemerintahan desa, mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. Dll
2	Sekretaris desa	Membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan	Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi, surat menyurat, arsip dan ekspedisi.
3	Kaur keuangan	Kepala urusan perencanaan berkedudukan sebagai unsur staf sekretaris	Mengkoordinasikan urusan perencanaan desa
4	Kaur perencanaan	Kepala urusan perencanaan bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas tugas pemerintahan	Mengkoordinasikan urusan perencanaan desa
5	Kaur umum	Mengagendakan penerimaan dan pengiriman surat, baik surat keluar ataupun surat masuk kedalam buku agenda desa	Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naska, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi.
6	Kasi pemerintahan	Kepala seksi pemerintahan bertugas untuk membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional dibidang	Melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan desa

		pemerintah	
7	Kasi pembangunan	Membantu lurah dalam melakukan pembinaan dan pelaksanaan administrasi di bidang pemberdayaan masyarakat pembangunan dan kesejahteraan rakyat	Pengkoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada seksi pelaksanaan kegiatan seksi pembangunan dan kesejahteraan soaial
8	Kasi kesra	Membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa	Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya.
9	Kadus I, II, III, IV	Berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya	Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah
10	BPD	Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa	Membahas dan meyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

11	LPMB	Mengkoordinir pelaksanaan monitoring sistem penjaminan mutu akademik dan non akademik	Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.
----	------	---	--

## 2. Kondisi Geografis Desa Paranggi

Secara geografis Desa Paranggi terletak di Wilayah Pesisir Toluk Tomini Kabupaten Parigi Moutong Propinsi Sulawesi Tengah dengan luas desa 630 ha, Posisi desa tepat berada pada jalur Trans Sulawesi. Secara Administratif Desa paranggi termasuk salah satu Desa padat Penduduk di wilayah Kecamatan Ampibabo dengan berbatas, Yakni:

- Utara berbatas dengan Desa Ampibabo Induk dan Ampibabo Timur
- Timur berbatas dengan Pesisir Teluk Tomini
- Selatan berbatas dengan Desa Ogolugus
- Barat berbatas dengan Desa Tombi.

## 1. Kondisi Demografis Desa Paranggi

### a. Jumlah Penduduk

Desa Paranggi mempunyai jumlah penduduk 1.842 Jiwa, yang tersebar dalam 04 (Empat) dusun. Di Desa Paranggi, yang memiliki jumlah

penduduk 1842 Jiwa terdiri dari laki-laki 929 jiwa dan perempuan 913 jiwa dengan jumlah 555 KK.<sup>74</sup>

b. Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan masyarakat Desa Paranggi adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.2** Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Paranggi

NO	URAIAN	JUMLAH
1	TK	41
2	SD	712
3	SMP	357
4	SMA	517
5	AKADEMI	18
6	SARJANA	145

Sumber: RPJMDes<sup>75</sup>

Bagi masyarakat Paranggi, pendidikan sudah menjadi tuntutan kebutuhan yang harus dipenuhi, namun terkadang hal ini tidak dapat dilakukan oleh masyarakat karena terbentur dengan tingginya biaya pendidikan yang ada.

c. Mata pencaharian

Sektor kegiatan unggulan Desa Paranggi yang paling dominan adalah sektor pertanian. Kegiatan sektor pertanian ini merupakan fungsi dan peran utama wilayah Desa Paranggi untuk memenuhi kebutuhan internal Desa, sebagai kondisi pasar regional. Sedangkan kegiatan sektor lainnya juga digolongkan sebagai sektor unggulan yang tidak terlalu dominan, namun sektor tersebut sangat penting untuk dikembangkan menjadi sektor pendukung terhadap

<sup>74</sup> Nursarice (sekretaris Desa) wawancara dengan penulis Paranggi 10 November 2023 bersumber dari RPJMDes 2019

<sup>75</sup> Nursarice (sekretaris Desa) wawancara dengan penulis Paranggi 10 November 2023 bersumber dari RPJMDes 2019

kegiatan unggulan. Kegiatan sektor yang perlu dikembangkan antara lain bidang peternakan, perdagangan dan industry kecil. Adapun Mata Pencarian Desa Paranggi adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.3** Mata pencaharian Masyarakat desa paranggi

No	Uraian	Jumlah
1	TANI	290
2	NELAYAN	138
3	DAGANG	15
4	SOPIR	2
5	BURUH	2
6	PNS	28
7	TNI	4
8	POLRI	2
9	SWASTA	58

## 2. Sarana dan prasarana desa

Kondisi sarana dan prasarana umum Desa paranggi secara garis besar adalah sebagai berikut :<sup>76</sup>

**Tabel 4. 4** Sarana Dan Prasarana Desa Paranggi

No	Uraian	Jumlah
1	Kantor desa	1 Unit
2	Masjid desa	4 Unit
3	SEKOLAH: SD Negri	2 Unit
	Ibtida' Iyah	1 Unit
	SDK	1 Unit

<sup>76</sup> Nursarice (sekretaris Desa) wawancara dengan penulis Paranggi 10 November 2023 bersumber dari RPJMDes 2019

	TK	2 Unit
	TK PAUD	1 Unit
4	Lapangan Bola	1 Buah
5	Kebun Desa	-
6	Dermaga TPI	1 Buah
7	Jalan Desa	7 Km
8	Lapangan Voli Ball	2 Buah
9	Lapangan Buluh Tangkis	2 Buah
10	Lapangan Takraw	1 Buah
11	Sungai	3 Alur
12	Pasar Ikan	1 Buah
13	Jembatan Desa	10 Buah
14	Perumahan	425 Unit

Sumber: RPJMDes<sup>77</sup>

### 3. Kondisi Sosial Budaya Dan Ekonomi Desa Paranggi

#### a. Sarana Perekonomian

Tradisi alam suatu daerah akan berpengaruh terhadap aktifitas atau mata pencaharian masyarakat setempat. Selain faktor kondisi alam, mata pencaharian dipengaruhi oleh potensi sosial dan ekonomi berupa kepadatan penduduk, keberadaan pasar dan sentra-sentra ekonomi lainnya. Mata pencaharian pokok penduduk sebagian besar berada di sektor perikanan dimana sebagian masyarakatnya adalah nelayan, sementara masyarakat yang lain bekerja sebagai pegawai negeri, wiraswasta, pertukangan, buru

---

<sup>77</sup> Nursarice (sekretaris Desa) wawancara dengan penulis Paranggi 10 November 2023 bersumber dari RPJMDes 2019

tani dan pensiunan. Selain itu dengan seiring banyaknya perniagaan yang terjadi di Desa Paranggi sedikit banyaknya menimbulkan efek rangsangan para usahawan yang ingin mengelola lahan yang ada di Desa Paranggi sebagai tempat berwiraswasta. Penduduk Desa Paranggi beraneka ragam yang menopang kehidupan keluarga masing-masing, namun mayoritas bermata pencaharian di bidang hasil laut, bengkel, dan perdagangan.

b. Sarana Sosial Budaya

Agama merupakan salah satu unsur yang sangat menentukan dalam pembentukan watak dan moral bagi setiap individu maupun kelompok masyarakat secara keseluruhan. Oleh karenanya secara terpadu dan berkesinambungan dalam pembinaannya memerlukan perhatian khusus dari unsur pemerintah, paraulama, dan para pemuka agama sehingga dapat menciptakan kerukunan hidup masyarakat. Perlu kita ketahui bahwa penduduk di Desa Paranggi beragama Muslim.<sup>78</sup>

4. Kondisi Pemerintahan dan kelembagaan masyarakat

a. Struktur pemerintahan desa

Kelembagaan Desa merupakan kumpulan orang-orang yang melakukan kerjasama, tergabung dalam lembaga/organisasi Desa dan mempunyai fungsi dalam menyokong, membantu pelaksanaan kewenangan Desa

---

<sup>78</sup> Nursarice (sekretaris Desa) wawancara dengan penulis Paranggi 10 November 2023 bersumber dari RPJMDes 2023

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga kemasyarakatan Desa bertugas melakukan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa. Adapun struktur pemerintah Desa Paranggi yaitu, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Dusun I, Dusun II, Dusun III Dan Dusun IV.

Desa Paranggi selama ini telah menyelenggarakan pemerintahan sesuai amanat perundang-undangan yang berlaku sampai dengan perubahan kebijakan pemerintah pusat sebagaimana tentang dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan turunannya pemerintah Desa Paranggi dipimpin oleh seorang Kepala Desa bersama perangkat Desa dan Perwakilan masyarakat dalam Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai fungsi pengawasan. Peran Lembaga kemasyarakatan Desa adalah sebagai wadah partisipasi masyarakat dan penyalur aspirasi masyarakat dalam berbagai aspek, serta sebagai mitra pemerintah Desa. Disamping itu fungsi dari Lembaga kemasyarakatan Desa adalah membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan masyarakat Desa, serta pemberdayaan masyarakat Desa.<sup>79</sup>

b. Kelembagaan masyarakat

Adapun kelembagaan masyarakat yang ada di desa Paranggi kecamatan Ampibabo kabupaten Parigi Moutong adalah kelompok masyarakat,

---

<sup>79</sup> bersumber dari RPJMDes 2019

BUMDesa, Linmas, PemDes, kepemudaan, TP-PKK , BPD, LPMDesa dan RISMA.

## B. Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Paranggi

### Tahun Anggaran 2019-2021

#### 1. Anggaran pendapatan dan belanja tahun 2019

a. Pendapatan desa	Rp. 1.098.215.796
b. Belanja desa	
• Bidang penyelenggaraan pemerintah desa	Rp. 256.867.616
• Bidang pelaksanaan dan pembangunan desa	Rp. 408.295.680
• Bidang pembinaan kemasyarakatan desa	Rp. 59.115.000
• Bidang pemberdayaan masyarakat desa	Rp. 394.693.320
• Bidang tak terduga	Rp. ....
Jumlah belanja	Rp. <u>994.723.426</u>
Surplus/deficit	Rp. ....
c. Pembiayaan desa	
• Penerimaan pembiayaan desa	Rp. 994.723.426
• Pengeluaran pembiayaan desa	Rp. 994.723.426
Selisih pembiayaan	Rp. ....

#### 2. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Tahun 2020<sup>80</sup>

a. Pendapatan desa	
• Pendapatan asli desa	Rp. 0,00
• Pendapatan transfer	Rp. 1.153.243.093,00
• Lain-lain pendapatan yang sah	Rp. <u>0,00</u>
<b>Jumlah pendapatan</b>	<b>Rp. 1.153.243.093,00</b>
b. Belanja desa	
• Bidang penyelenggaraan pemerintah desa	Rp. 269.707.093,00
• Bidang pelaksanaan pembangunan desa	Rp. 414.719.200,00
• Bidang pembinaan kemasyarakatan desa	Rp. 69.650.000,00
• Bidang pemberdayaan masyarakat desa	Rp. 0,00
• Bidang penanggulangan bencana keadaan	Rp. 349.166.800,00

<sup>80</sup> Nursarice (sekretaris Desa) wawancara dengan penulis Paranggi 10 November 2023 bersumber dari RPJMDes 2023

darurat dan mendesak desa	
<b>Jumlah belanja</b>	<b><u>Rp. 1.103.243.093,00</u></b>
Surplus/Defisit	<u>Rp. 50.000.000,00</u>

c. Pembiayaan desa	
• Penerimaan pembiayaan	Rp. 0.00
• Pengeluaran pembiayaan	<u>Rp. 50.000.000,00</u>
Selisih pembiayaan (a-b)	<u>Rp. . 50.000.000,00</u>
Sisa lebih/kurang perhitungan anggaran	<u>Rp. . 0.00</u>

### 3. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Tahun 2021

a. Pendapatan desa	
b. Pendapatan transfer	Rp. 1.070.813.605,00
c. Dana desa	Rp. 798.893.000,00
d. Bagi hasil pajak daerah	Rp. 4.789.398,00
e. Alokasi dana desa	Rp. 265.005.498,00
f. Bagi hasil retribusi daerah	<u>Rp. 2.127.709,00</u>
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b><u>Rp. 1.070.813.605,00</u></b>

### C. Pengelolaan Dana Desa Di Desa Paranggi Tahun 2019-2021

Penelitian yang dilakukan adalah Analisis Pengelolaan Dana Desa di Desa Paranggi. Penelitian ini dilakukan agar mengetahui kinerja pemerintah Desa Paranggi Dalam Pengelolaan Dana Desa. Pengelolaan Dana Desa Paranggi ini dikelola langsung oleh pegawai desa, Kepala desa sebagai penanggung jawab program.

Proses penentuan program dana desa di desa paranggi ini, melalui proses musyawarah antara Pemerintah Desa dan tokoh masyarakat dalam menyampaikan aspirasi masyarakat di Desa tersebut. Pada tahun 2019-2021 ini program telah di musyawarahkan serta dana sudah masuk di rekening Desa maka perangkat desa

mempunyai Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk membuat surat perintah pembayaran (SPP).<sup>81</sup>

Penggunaan alokasi dana desa yang diterima pemerintah desa 30%, Dana Desa dipergunakan untuk operasional penyelenggaraan pemerintah desa dalam pembiayaan operasional Desa, biaya operasional BPD, dan biaya operasional Tim penyelenggara Dana Desa. Ada beberapa tahapan dalam proses Pengelolaan Dana Desa agar mencapai kesejahteraan masyarakat:

1. Tahap perencanaan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Perencanaan Pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan fisik Desa Paranggi dapat dilihat dari prosedur perencanaannya, yang melibatkan masyarakat dan tokoh masyarakat diikut sertakan dalam perencanaan, dengan diberikannya wewenang kepada masyarakat untuk memberikan ide/pemikiran untuk menentukan pembangunan MCK, drainase, rabat beton, pembangunan beda rumah, perbaikan posyandu, pembuatan talut dan perbaikan sarana dan prasarana yang mengutamakan kepentingan masyarakat terlebih dahulu untuk Pengelolaan Dana Desa dapat dilakukan dengan baik. Proses perencanaan yang ada telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dalam hal ini pemerintah Desa Paranggi melibatkan semua elemen masyarakat yang ada di Desa Paranggi tersebut seperti tokoh masyarakat, lembaga adat, tokoh agama, kepala dusun, dan masyarakat yang menyumbang ide/pemikirannya dan

---

<sup>81</sup> Dokumen Desa Paranggi, November 2023

tenaga sehingga proses perencanaan dapat berjalan sesuai dengan harapan dan aspirasi masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kepala Desa Paranggi tentang rancangan yang di susun melalui RPJMDesa, menurut bapak Mohamad Rizal S. Dariseh selaku kepala Desa:

“jadi pada saat (MUSREMBANG-DESA) banyak masyarakat yang menyampaikan usulan yang di sampaikan dan diwakilkan oleh kepala Dusun, dan usulan tersebut di tampung oleh BPD, namun dari usulan tersebut ada yang diterima ada juga yang tidak, karena masih terbatasnya dana yang di salurkan ke desa. Dari usulan tersebut hanya yang paling dibutuhkan yang akan dipilih oleh anggota BPD”<sup>82</sup>.

Sedangkan menurut ibu Lina selaku masyarakat desa Paranggi yang berhasil penulis wawancara mengatakan bahwa :

”Pada saat (MUSREMBANG-DESA) masyarakat mengusulkan tentang infrastruktur yang harus dibangun di desa. Dan saya menganggap bahwa ada beberapa usulan yang diterima yang sangat di butuhkan masyarakat ada juga yang belum dipilih karena dana yang belum mencukupi”<sup>83</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa pemerintah desa Paranggi dalam tahap perencanaan telah melibatkan masyarakat dengan mendengar usulan dari masyarakat serta mengutamakan kebutuhan di desa Paranggi tersebut.

## 2. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Di Desa Paranggi dalam pembangunan fisik sudah melaksanakan nya dengan baik, hak tersebut dilihat dari berbagai upaya masyarakat yang dilakukan pemerintah desa untuk mendorong partisipasi masyarakat untuk membantu dalam pelaksanaan dana desa. Salah

---

<sup>82</sup> Mohamad Rizal S. Dariseh (kepala desa) wawancara dengan penulis, paranggi 06 november 2023

<sup>83</sup> Lina (masyarakat desa Paranggi) wawancara dengan penulis, paranggi 06 November 2023

satu upaya pemerintah Desa Paranggi dalam pembangunan fisik yaitu pembangunan MCK, drainase, rabat beton, pembangunan bedah rumah, perbaikan posyandu, dan perbaikan sarana dan prasarana yang mengutamakan kepentingan masyarakat. Hasil wawancara dengan Ibu Nursarice selaku sekretaris desa Paranggi mengatakan bahwa:

“memang kami akui bahwa pelaksanaan pengelolaan dana desa berjalan dengan baik mulai dari penyusunan program kegiatan hingga pembangunan infrastruktur”.<sup>84</sup>

Sedangkan menurut ibu Fitniar yang peneliti wawancarai mengatakan bahwa:

“jika dilihat insfrastruktur yang telah jadi maka bisa kami katakan bahwa pembangunan di desa Paranggi ini sudah berjalan baik pemerintah desa melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab mereka seperti pembuatan dreanase, membuat wc untuk ibu hamil sebanyak 9 buah, sumur suntik 8 buah (tiap dusun terdapat 2 buah sumur suntik) dan sengsr, mesin paras lain-lain.”<sup>85</sup>

Berdasarkan hasil dari wawancara tersebut bahwa tahap pelaksanaan sudah sesuai dengan prosedur yang ada.

### 3. Tahap Penatausahaan

Berdasarkan hasil penelitian Penatausahaan Pengelolaan Dana Desa Di Desa Paranggi dalam pembangun fisik sudah berdasarkan prosedur dan aturan pemerintah untuk setiap kegiatan perencanaan dan pelaksanaan yang dikelola oleh pemerintah desa. kemudian dari hasil pengarsipan ini akan dilaporkan kepada masyarakat, untuk masyarakat tau biaya anggaran pengelolaan pembangunan Desa Paranggi yang sesuai dengan rincian dan di

---

<sup>84</sup> Nursarice (sekretaris desa) wawancara dengan penulis, paranggi 06 November 2023

<sup>85</sup> Fitniar (masyarakat desa Paranggi) wawancara dengan penulis, paranggi 06 November 2023

arsipkan oleh pemerintah desa. Dengan adanya penatausahaan adalah sebagai bukti dan mempermudah masyarakat untuk mengetahui apakah tidak adanya penyelewengan dari dana desa untuk pembangunan fisik Desa Paranggi demi meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat sebagai apresiasi dari pemerintah menjadi pembuktian untuk hal tersebut.

Hasil wawancara dengan Ibu Nursarice selaku sekretaris desa Paranggi mengatakan bahwa:

“Alhamdulillah, Semua sudah terlaksana dengan baik dan kami memanfaatkan sumber daya manusia yang ada di desa kami sendiri dan memberikan gaji yang sesuai dengan kesepakatan bersama.”<sup>86</sup>

Sedangkan menurut Melda selaku masyarakat Desa Paranggi mengatakan bahwa :

“jika saya melihat memang betul sudah ada beberapa yang di bangun oleh pemerintah desa menggunakan dana desa tersebut seperti rehap rumah warga yang kurang mampu yang menurut Pemerintah desa berhak mendapatkannya”.<sup>87</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka Pemerintah desa dalam tahap penatausahaan sudah sesuai. Penggunaan dana desa yang di terima pemerintah desa 30% alokasi dana desa dipergunakan untuk operasional penyelenggaraan pemerintah desa dalam pembiyaan operasional desa, biaya operasional BPD, dan biaya operasional tim penyelenggara alokasi dana desa.

---

<sup>86</sup> Nursarice (sekretaris desa) wawancara dengan penulis, paranggi 06 November 2023

<sup>87</sup> Melda (masyarakat desa paranggi) wawancara dengan penulis, paranggi 06 November 2023

#### 4. Tahap Pelaporan

Tahap pelaporan dalam sebuah organisasi pemerintahan merupakan hal yang sangat penting. Sebab Tahap pelaporan ini menyangkut masalah prinsip-prinsip organisasi administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan yang telah diambil oleh organisasi pemerintahan. Sehingga tahap pelaporan ini menjadi salah satu faktor penting dalam menilai kinerja pegawai di pemerintahan Desa Paranggi Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong.

Oleh karena itu, untuk mengetahui seperti apa Tahap pelaporan ini mempengaruhi kinerja pegawai di pemerintahsn desa Paranggi kecamatan ampibabo kabupaten parigi moutong, maka peneliti mewawancarai beberapa informan salah satunya adalah ibu Rosnawati selaku kaur keuangan desa Paranggi mengatakan bahwa:

“Berdasarkan hasil penelitian Laporan Pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan fisik Desa Paranggi adalah sudah di laporkan kepada masyarakat dan BPD untuk kemudian dipertanggung jawabkan hasil dari seluruh kegiatan Pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan fisik di Desa Paranggi. Jika dilihat dari penelitian pertanggung jawaban Pengelolaan Dana Desa, yang kemudian dapat di pertanggung jawabkan oleh pemerintah Desa Paranggi kepada masyarakat dengan baik”.<sup>88</sup>

Sedangkan menurut yunita selaku nasyarakat mengatakan bahwa :

”terkait pelaporan biasa telah di wakikan oleh kepala dusunnya jika tidak ada bermasalah di desa terkait administrasi berarti pelaporannya sudah cukup baik”.<sup>89</sup>

---

<sup>88</sup> Rosnawati (kaur keuangan desa) wawancara dengan penulis, paranggi 06 November 2023

<sup>89</sup> Yunita (masyarakat desa paranggi) wawancara dengan penulis, paranggi 06 November 2023

Berdasarkan hasil dari wawancara tersebut bahwa tahap pelaporan di desa Paranggi sudah cukup baik.

#### 5. Tahap Pemeliharaan

Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang didanai Dana Desa di Desa Paranggi pada dasarnya adalah untuk mengentas kemiskinan, pemerataan pendapatan, kesempatan kerja, dan kesempatan berusaha sehingga masyarakat harus bisa memanfaatkannya dengan baik.

Hasil wawancara dengan ibu Andiaji selaku masyarakat desa Paranggi mengatakan bahwa:

“Menurut saya sebagai masyarakat bahwa masyarakat harus bisa memanfaatkan sesuatu yang telah dibangun di desa seperti peralatan untuk petani dan lain lain. Dan saya melihat masyarakat desa Paranggi telah melakukan hal tersebut.”<sup>90</sup>

Berdasarkan hasil dari wawancara tersebut bahwa tahap pemeliharaan di desa Paranggi sudah cukup baik.

### **D. Kinerja Karyawan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Paranggi**

Kinerja aparatur desa paranggi sangat berpengaruh dengan keberhasilan pengelolaan dana Desa, maka dari itu pegawai kantor desa harus mampu mengelolah dana desa dengan baik dan benar yaitu mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. sebab kinerja pegawai desa yang baik akan memberikan kualitas yang baik pula untuk masyarakat. Maka kualitas kinerja aparatur Desa paranggi

---

<sup>90</sup> Andiaji (masyarakat desa paranggi) wawancara dengan penulis, paranggi 06 November 2023

akan dilihat berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pemerintah desa, BPD dan masyarakat Desa paranggi.

a. Kualitas Pekerjaan

Kualitas kerja merupakan suatu hasil yang dapat diukur dengan efisien dan efektivitas sesuatu pekerjaan pemerintah Desa paranggi Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong dalam memberikan kualitas pelayanan terhadap masyarakat Desa paranggi Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong. Kualitas Pekerjaan ini pula merupakan suatu hal yang digunakan untuk mengukur seberapa baik seorang karyawan mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan pemerintah Desa paranggi Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong dalam pengelolaan dana desa seperti yang disampaikan oleh Rosmawati selaku kaur keuangan Desa paranggi Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong yang mengatakan bahwa :

“menurut saya sudah cukup baik karna sudah sesuai dengan peraturan undang-undang no 12 tahun 2008 yang meliputi tiga bagian utama yaitu perencanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.”<sup>91</sup>

Selain itu menurut Andris selaku masyarakat desa paranggi mengatakan bahwa

“Menurut saya kualitas pekerjaan pemerintahan desa paranggi sudah cukup baik karna mereka menjalankan tugas yang sesuai dengan peraturan yang ada, seperti karyawan desa bertanggung jawab atas tugas yang diberikan masing masing, dan setiap ada bantuan tetap dilaporkan kepada masyarakat.”<sup>92</sup>

---

<sup>91</sup> Rosmawati (kaur keuangan Desa) wawancara dengan penulis, Paranggi 06 november 2023

<sup>92</sup> Andris ( masyarakat desa paranggi ) wawancara dengan penulis, paranggi 06 November 2023

Berdasarkan dari beberapa informan di atas mengakui bahwa kualitas kerja di pemerintah Desa Paranggi Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong sudah cukup baik. Karna pemerintahan Desa Paranggi Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong sudah mengikuti prosedur yang ada dalam undang-undang nomor 12 tahun 2008 yang meliputi tiga bagian yang utama yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.

b. Kuantitas Kerja

Kuantitas kerja cenderung menjadi sangat penting dalam menjalankan organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai kinerja karyawan yang muncul karena ketidakpuasan masyarakat dalam bekerja. Hal ini seperti yang terjadi di pemerintah Desa Paranggi Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong. Berkualitas tidaknya pekerjaan yang diberikan ini akan berpengaruh pada kinerja pegawai di pemerintah Desa Paranggi Kecamatan Ampibab Kabupaten Parigi Moutong. Dengan demikian keputusan masyarakat terkait masalah kuantitas kerja dapat dijadikan indikator kerja organisasi. Kuantitas kerja yang dimiliki oleh pemerintah Desa Paranggi Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong ini dapat dijadikan satu indikator dalam mengukur kinerja karyawan pemerintah Desa Paranggi Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong.

Oleh karena itu, untuk mengetahui seperti apa kuantitas kerja pegawai di pemerintah Desa Paranggi Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong maka peneliti tentunya mewawancarai beberapa informan terkait masalah kuantitas kerja pemerintah Desa Paranggi Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong. Seperti yang disampaikan oleh nerni selaku masyarakat Desa Paranggi mengatakan bahwa :

“Kalau ditanya terkait kuantitas kerja karyawannya sudah cukup baik, karna karyawan sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan , yang mana hasil kerjanya seperti membuat wc untuk ibu hamil dan rainasi selokan di setiap dusun”<sup>93</sup>.

Sementara Bapak Nahir selaku ketua BPD Desa Parigi Moutong mengatakan bahwa:

“kalau menurut saya jika kita melihat kuantitas kerja pemerintah desa paranggi ini sudah cukup baik, karna kami sebagai pemerintah desa sudah menjalankan visi dan misi yang ada, karna tiap tahunnya kami menargetkan sekitar 75% selesai dalam melakukan pekerjaan pembangunan rainasi maupun pembuatan wc untuk ibu hamil”<sup>94</sup>.

Maka hasil wawancara menyimpulkan bahwa kuantitas kinerja pemerintah desa paranggi kecamatan ampibabo kabupaten parigi moutong sudah cukup baik karna bertanggungjawab sebagai pemerintah desa dengan menjalankan visi dan misi yang ada.

#### c. Pelaksanaan Tugas

---

<sup>93</sup> Nerni ( Masyarakat Desa Paranggi) wawancara dengan Penulis, Paranggi 06 November 2023.

<sup>94</sup> Nahir (ketua BPD Desa) wawancara dengan penulis, Paranggi 06 November 2023

Pelaksanaan adalah kemampuan karyawan pemerintah Desa Paranggi Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong untuk mengenali apa yang menjadi keinginan masyarakat, dan kemampuan untuk menyusun agenda prioritas kerja dalam mengembangkan program-program kerja karyawan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat Desa Paranggi Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong.

Pelaksanaan tugas juga mempunyai arti seberapa jauh karyawan mampu melakukan pekerjaannya dengan akurat, pelaksanaan tugas yang rendah ditunjukkan dengan ketidak selarasan antara kinerja dan kebutuhan publik. Oleh karena itu, untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan pemerintah Desa Paranggi Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong dalam hal ini menjalankan tugas dan fungsi terutama dalam kebijakan pengelolaan Dana Desa, maka peneliti harus mewawancarai beberapa informan yang dianggap faham dan mengerti dengan tugas pemerintah Desa Paranggi Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong.

Oleh karena itu, faktor pelaksanaan kerja aparatur menjadi salah satu faktor yang sangat penting untuk ditingkatkan demi berjalannya pengelolaan dana desa pemerintah desa Paranggi Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong. Sementara bapak Mohamad Rizal S. Dariseh selaku kepala Desa Paranggi mengatakan bahwa:<sup>95</sup>

---

<sup>95</sup> Mohamad Rizal S. Dariseh (Kepala Desa) wawancara dengan penulis, Paranggi 06 November 2023

“Kalau saya ditanya terkait pelaksanaan tugas yang memiliki arti kemampuan pemerintah Desa dalam menjalankan visi dan misi maka pemerintah desa paranggi selalu bersinergi<sup>96</sup> dalam mewujudkan visi misi saya mengakui juga bahwa karyawan di kantor Desa paranggi ini sudah tau apa fungsi yang harus mereka jalankan serta tugas berupa administrasi dan pelaporan pertanggung jawaban keuangan pemerintah Desa paranggi sudah tidak mengalami kesulitan”

Faktor pelaksanaan kinerja aparat Pemerintah Desa paranggi kecamatan ampibabo Kabupaten Parigi Moutong dalam mengelola administrasi serta keuangan di kantor Desa Paranggi. Ini sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kerja yang dimiliki Karyawan di pemerintah Desa Paranggi Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong.

Oleh karena itu, pelaksanaan kerja dalam pemerintah Desa Paranggi Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong sangat penting untuk di tingkatkan demi tercapainya kinerja pemerintah Desa Paranggi Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong yang baik dalam menjalankan tugas serta fungsinya dalam hal Pengelolaan Dana Desa. Sedangkan menurut ibu Nursarice selaku sekretaris desa Paranggi mengatakan bahwa :

“Menurut saya terkait responsivitas pegawai pemerintah desa sudah mengetahui fungsi dan tugas mereka dalam pengelolaan alokasi dana desa sehingga terjalin kerja sama yang baik terkait pemerintah desa dan atasan dalam pelaporan pertanggung jawaban”.<sup>97</sup>

Sedangkan menurut ibu Andi Sapara selaku masyarakat desa Paranggi mengatakan bahwa:

---

<sup>97</sup> Nursarice (sekretaris desa) wawancara dengan penulis, paranggi 06 november 2023

“Saya melihat sudah cukup baik karena pemerintah bekerja sudah sesuai tugas dan fungsi mereka sehingga mereka dapat mewujudkan visi dan misi sesuai dengan arahan kepala desa dan kebijakan yang ada”.<sup>98</sup>

Pelaksanaan tugas ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terhadap kinerja dipemerintah Desa Paranggi Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong. Namun Pelaksanaan tugas ini sudah berjalan dengan baik hal ini terlihat dari kemampuan karyawan pemerintah Desa Paranggi Kecamatan Ampibabo dalam merespon cepat apa yang menjadi keinginan publik. Sehingga segala program akan dapat diketahui yang mana yang harus menjadi program prioritas dan tidak prioritas untuk dilaksanakan pada program kedepannya di pemerintah Desa Paranggi Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong.

Oleh karena itu, pelaksanaan tugas yang baik akan membuat kinerja akan lebih baik pula seperti pelaksanaan tugas serta fungsi dalam pengelolaan alokasi dana desa dari pada pemerintah Desa Paranggi Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong dapat berjalan dengan baik walaupun mungkin di dalamnya terdapat masalah seperti faktor kualitas pelayanan dan produktivitas dalam pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Dari Pemerintah Desa Paranggi Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong.

---

<sup>98</sup> Andi Sapara (masyarakat desa Paranggi) wawancara dengan penulis, paranggi 06 November 2023

#### d. Tanggung Jawab

Tanggung jawab adalah melakukan semua tugas dan kewajibannya dengan sungguh-sungguh. Sehingga faktor responsibilitas ini menjadi salah satu faktor penting dalam menilai kinerja karyawan di pemerintahan Desa Paranggi Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong. Oleh karena itu, untuk mengetahui seperti apa faktor tanggung jawab ini mempengaruhi kinerja karyawan di pemerintahan desa paranggi kecamatan ampibabo kabupaten parigi moutong, maka peneliti mewawancarai beberapa informan salah satunya adalah Bapak Mohamad Rizal S. Dariseh selaku kepala Desa Paranggi mengatakan bahwa:

“Kalau terkait tanggung jawab maka saya mengatakan bahwa pemerintah desa Paranggi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sudah sesuai prinsip-prinsip administrasi yang sesuai dengan aturan dan kebijakan pemerintah ini menggambarkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsinya sudah berjalan dengan baik”.<sup>99</sup>

Tanggung jawab ini merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam mengukur sejauh mana kinerja pemerintah desa paranggi kecamatan ampibabo kabupaten parigi moutong dalam melaksanakan tugas pengelolaan dana desa. Tanggung jawab yang baik akan membuat kinerja baik pula begitupun sebaliknya. Seperti hasil wawancara dengan ketua BPD Bapak Nahir mengatakan bahwa:

“Saya melihat dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam kinerja dan pengelolaan dana desa pemerintah desa Paranggi sudah sesuai dengan prinsip-

---

<sup>99</sup> Mohamad Rizal S. Dariseh (Kepala Desa) wawancara dengan penulis, Paranggi 06 November 2023

prinsip yang ada dan sesuai seperti apa yang telah ada diadministrasi maka dari itu bisa dikatakan sudah berjalan dengan baik”.<sup>100</sup>

Berdasarkan hasil wawancara telah membenarkan bahwa pelaksanaan kinerja di pemerintah Desa paranggi kecamatan ampibabo kabupaten parigi moutong sudah berjalan dengan baik yang dimana pemerintah desa paranggi kecamatan ampibabo kabupaten parigi moutong dalam melaksanakan tugas serta fungsinya sudah berdasarkan pada admistrasi yang baik dan benar. Oleh karena itu, tanggung jawab ini penting untuk tetap dijaga dan ditingkatkan demi terciptanya kinerja pemerintah Desa paranggi kecamatan ampibabo kabupaten parigi moutong menjadi lebih baik dan sesuai harapan bersama. Tanggung jawab yang baik dalam sebuah instansi ini adalah salah satu indikator dalam penilaian kinerja pemerintah Desa Paranggi Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong.

Berdasarkan hasil wawancara telah membenarkan bahwa pelaksanaan kinerja aparatur Desa Paranggi Kecamatan Ampibabo Kabupaten parigi Moutong dalam kinerja dana Desa Paranggi sudah berjalan dengan baik yang dimana aparatur Desa Paranggi Kecamatan Ampibabo Kabupaten parigi Moutong dalam melaksanakan sudah berdasarkan pada kebijakan yang telah ditetapkan.

---

<sup>100</sup> Nahir (Ketua BPD Desa) wawancara dengan penulis, Paranggi 06 November 2023

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan di atas dapat di tarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Pengelolaan Dana Desa Paranggi Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong cukup baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pemeliharaan karena pengelolaan dana desa Paranggi Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong patuh terhadap peraturan atau kebijakan peraturan daerah dan arahan kepala desa serta terbuka untuk mendengarkan aspirasi masyarakat dengan baik dan sesuai prosedur yang ada.
2. Kinerja Aparatur Desa Paranggi Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong dalam pengelolaan dana desa sudah cukup baik dari segi kuantitas kerja, kualitas pekerjaan, pelaksanaan tugas, dan tanggung jawab, karena aparatur Desa Paranggi Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong patuh terhadap peraturan atau kebijakan peraturan daerah dan arahan kepala desa serta terbuka untuk mendengarkan aspirasi masyarakat dengan baik dan sesuai prosedur yang ada.

#### **B. Saran**

Adapun saran-saran yang penulis ingin berikan yaitu kepada yaitu Kepala Desa, Masyarakat, Aparatur Desa Paranggi, Kementerian Desa:

1. Saran penulis kepada Kepala Desa Paranggi Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong yaitu, agar lebih meningkatkan sumber daya manusia aparatur Desa Paranggi Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong.
2. Saran penulis kepada masyarakat yaitu, agar lebih bijak dalam setiap melakukan komplek terhadap kinerja dari aparatur desa Paranggi Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong Parigi Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong harus sesuai dengan prosedur yang ada.
3. Saran penulis kepada aparatur desa yaitu tingkatkan kinerja pada aspek kualitas pelayanan dan produktivitas.
4. Saran penulis kepada Kementerian Desa yaitu lebih di tingkatkan lagi kesejahteraan bagi aparatur desa.
5. Saran penulis kepada pembaca terkait judul yaitu Peran badan usaha milik desa (BUMDES) Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Desa Paranggi Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong.

## DAFTAR PUSTAKA

- Mufiz Ali, *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*, (Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka, 2011).
- Triyono Aris, 'Pengaruh Lokasi Dana Desa Serta Program Pembangunan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Bukit Lipai Kecamatan Batang Cenaku', *Jurnal Manajemen Serta Bisnis*, 2018
- Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet.10; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 77.
- Kurnia Dadang, 'Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Serta Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa', *Baserta Pengawasan Keuangan Serta Pembangunan (BPKP)*. Jakarta 2015.
- Ghony Djunaidi dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet.1; Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Hatimah Husnul, Analisis Kinerja Perangkat Desa Terhadap Penggunaan Dana Desa Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Watatu Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala), Alumni Mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, Skripsi 2020, Dipublikasikan.
- Arianto I, Analisis Kinerja Aparatur Desa Dalam pengelolaan Dana Desa Taunca, Skripsi Universitas sintuvu maroso, 2018.
- Bawono Icuk Rangga dan Erwin Setyadi, *Panduan Penggunaan Dan Pengelolaan Dana Desa*, Grasindo: Jakarta, 2019.
- Muhajir Neong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Ed, III, Cet. VII, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), 104.
- Raharjo Muhamad Mu'iz, 2021, *Pengelolaan Dana Desa*, Jakarta: Diterbitkan PT Bumi Aksara.
- Muhajir Neong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ed, III, Cet. VII, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.
- Rahmawati dan Muhammad Awal Satrio Nugroho. Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Rongkop Kabupaten Gunungkidul. *Jurnal Riset*

- Akuntansi dan Bisnis Indonesia STIE Wiya Wiwaha.2021. <https://jurnal.stieww.ac.id>.
- wahdani Reski, Analisis kinerja aparaturnya desa-jonjo kecamatan Parigi Kabupaten Gowa, Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021.
- Pradistya Reyvan Maulid. *Teknik triangulasi dalam pengolahan data kualitatif*, Banten:DOLAB, 2009.
- Tanjung Salman Husin, *Sistem Pemerintahan Desa Edisi Kedua*, Sumedang: Alqa Print Jatinangor, 2005.
- Lamandasa Serlia R, Seprianus ntada dengan judul “ Analisis kinerja Aparatur Pemerintah Desa Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bulili Kecamatan lore selatan”, *jurnal ekomen*, vol 20, N. 2, 2020
- Sululing Siswadi. *Sosialisasi Model Pengelolaan Keuangan Desa*, *JMM-Jurnal Masyarakat Merdeka*, 2018. <https://jmm.unmerpas.ac.id>
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D*, Cet.17; Bandung: Alfabeta, 2012.
- Panirkan Sumria, ‘Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan Sumber Daya Desa Raku Kecamatan Tabukan Utara’ *Jurnal Manajemen Serta Bisnis*, 2018
- panirkan Sumria, ‘Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan Sumber Daya Desa Raku Kecamatan Tabukan Utara’ *Jurnal Manajemen Serta Bisnis*, 2018
- Permendesa, PDT, dan Transmigrasi RI No.21 Tahun 2016 tentang *Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015*, Permendesa No.B Tahun.2016. <http://www.kemenkeu.go.id/dana-desa>
- Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian dan Bimbingan Konseling*, Cet.3; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Umar Husein, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Cet.12 ; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 42
- Eva Yayu Sri. ‘Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas Dan Rasio Pertumbuhan Pada Kantor Desa Jampu Kabupaten Soppeng’. *Jurnal manajemen dan bisnis* 2019.

Andris ( masyarakat desa paranggi ) wawancara dengan penulis, paranggi 06 November 2023

Rosmawati (kaur keuangan Desa) wawancara dengan penulis, Paranggi 06 november 2023.

Mohamad Rizal S. Dariseh (kepala desa) wawancara dengan penulis, paranggi 06 november 2023.

Lina (masyarakat desa Paranggi) wawancara dengan penulis, paranggi 06 November 2023.

Melda (masyarakat desa paranggi) wawancara dengan penulis, paranggi 06 November 2023.

Nursarice (sekretaris desa) wawancara dengan penulis, paranggi 06 November 2023.

Yunita (masyarakat desa paranggi) wawancara dengan penulis, paranggi 06 November 2023.

Andiaji (masyarakat desa paranggi) wawancara dengan penulis, paranggi 06 November 2023.

Sapara Andi (masyarakat desa Paranggi) wawancara dengan penulis, paranggi 06 November 2023.

## **FORMAT PERTANYAAN**

Nama ibu/bapak:

1. Menurut bapak/ibu bagaimana/seperti apa Kualitas pekerja karyawan di kantor desa paranggi.?

Jawaban:

2. Menurut bapak/ibu bagaimana/seperti apa Kualitas kerja karyawan di kantor desa paranggi.?

Jawaban:

3. Menurut bapak/ibu bagaimana/seperti apa Pelaksanaan tugas karyawan di kantor desa paranggi.?

Jawaban:

4. Menurut bapak/ibu bagaimana/seperti apa Tanggung jawab karyawan di kantor desa paranggi.?

Jawaban :

## **FORMAT PERTANYAAN**

Nama ibu/bapak:

1. Menurut bapak/ibu bagaimana/seperti apa tahap perencanaan karyawan di kantor desa paranggi.?

Jawaban:

2. Menurut bapak/ibu bagaimana/seperti apa tahap pelaksanaan karyawan di kantor desa paranggi.?

Jawaban:

3. Menurut bapak/ibu bagaimana/seperti apa tahap penatausahaan karyawan di kantor desa paranggi.?

Jawaban:

4. Menurut bapak/ibu bagaimana/seperti apa tahap pelaporan karyawan di kantor desa paranggi.?

Jawaban :

**LAMPIRAN**  
**RIWAYAT HIDUP PENULIS**



**A. Identitas**

Nama : Abd.Rahmat  
Nim : 195120150  
Tempat/Tanggal Lahir : Paranggi, 09 Desember 2001  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Suku/Bangsa : Kaili/Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat : Dusun Pregoa I

**B. Riwayat Pendidikan**

- a. Tamat Sekolah Dasar Impres 2 Paranggi Tahun 2013
- b. Tamat Madrasah Tsanawiyah Alkhairat Ampibabo 2016
- c. Tamat Sekolah Menengah Atas Negri I Ampibabo Tahun 2019
- d. Terdaftar Sebagai Mahasiswa Universitas Islam Negri Datokarama Palu Tahun 2019 Sampai Sekarang

Foto surat pengajuan penelitian

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU**  
جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو  
**STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jl. Diponegoro No.23 Palu, Telp. 0451-460796, Fax. 0451-460155  
Website : www.iainpalu.ac.id email: humas@iainpalu.ac.id

Nomor : 3087 / Un.24 / F.IV / pp.00.9 / 10 / 2023 27 Oktober 2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Izin Penelitian

Yth.  
**Kepala Desa Paranggi**  
di -  
Tempat

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : Abd. Rahmat  
NIM : 19.5.12.0150  
TTL : Paranggi, 09 Desember 2001  
Semester : IX  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Prodi : Ekonomi Syariah  
Alamat : Mambo

Untuk melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : **Analisis kinerja Pengelolaan Dana Desa (studi kasus Desa Paranggi, Kecamatan Ampibabo Tahun 2019-2021)**

Dosen Pembimbing :

1. **Dr. Ermawati, S.Ag., M.Ag.**
2. **Nurfitriani, S.El., M.E**

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian di Desa Paranggi, Kecamatan Ampibabo

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalam.*

  
**Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I**  
NIP. 19650505 199903 1 002

Foto surat balasan penelitian

**PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG**  
**KECAMATAN AMPIBABO**  
**DESA PARANGGI**  
Alamat : Jl. Trans Sulawesi No..... Kode Pos 94474 Sulawesi Tengah

---

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**  
Nomor : 140/325/Pem-DP/χ /2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MOHAMAD RIZAL S. DARISEH  
Jabatan : Kepala Desa

Dengan ini menerangkan kepada :

Nama : ABD. RAHMAT  
No. Stambuk : 19.5.12.0150  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Kampus : UIN DATOKARAMA

Benar bahwa nama yang tersebut diatas telah melakukan Penelitian di Desa Paranggi kec. Ampibabo Kab. Parigi Moutong dengan Judul Penelitian “**Analisis Kinerja Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Paranggi, Kecamatan Ampibabo Tahun 2019-2021)**”

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dibuat dengan benar dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat di gunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Paranggi  
Pada Tanggal : 30 Oktober 2023

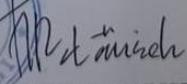
Kepala Desa Paranggi  
  
**MOHAMAD RIZAL S. DARISEH**



Foto bersama kepala desa



Fotot bersama sekretaris desa



Foto bersama ketua BPD



Kegiatan wawancara kepada masyarakat



Foto kegiatan pembangunan yang terlaksana  
Pembuatan wc untuk ibu hamil sebanyak 9 buah.



Foto sumur suntik



Foto Sensor dan mesin paras



Rainase selokan tiap dusun



Foto pembagian bibit kepada masyarakat

